

PENGARUH ANGGARAN TERHADAP EFEKTIFITAS PROGRAM

(Hasil Kajian Pada Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Periode 2006-2010)

Oleh
HENDI PRIHANTO
NPM : 5510221003

THESIS



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA
2013**



UNIVERSITAS PANCASILA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : HENDI PRIHANTO
NIM : 5510221003
Program : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Keuangan Negara
Judul : Pengaruh Anggaran Terhadap Efektifitas Program (Hasil Kajian Pada Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Periode 2006-2010)

Jakarta, Pebruari 2013

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Soeratno, SE., MM.

Dosen Pembimbing II

Dr. Suyanto, SE., MM., M.Ak.

Mengetahui
Ketua Program

Dr. H. Soeratno, SE., MM.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan thesis ini dengan judul “Pengaruh Anggaran Pendapatan terhadap Efektifitas Program (Hasil Kajian Pada Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Periode 2006-2010)”.

Thesis ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, maka secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si., selaku Rektor Universitas Pancasila yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan thesis.
2. Bapak Prof. Dr. Sutjipto, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Pancasila yang telah memberikan dukungan moral atas tersusunnya thesis.
3. Ibu Dr. Tri Widystuti.,SE.,MM.,Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan motivasi serta membimbing dalam penyelesaian thesis ini.
4. Bapak Dr. H. Suratno. SE.,MM, selaku ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Pancasila dan selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penulis thesis ini.
5. Dr.Suyanto, SE.,MM.,M.Ak. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dalam penulisan thesis ini.
6. Seluruh Dosen dan staf pengajar pada program Magister Akuntansi yang telah memberikan dukungan dalam penulis thesis ini.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memanjatkan doa dan memberikan semangat, juga Istriku Diana Irawati dan keempat anakku Vidya Eko Prasetyo, (Alm.) Rindu Anindya Prihanto, Violeta Kumala Astadewi dan Vianda Rayyan Alkhalfi yang selalu memberi dorongan dan perhatian.

8. Prof.Dr.H. Sunarto, M.Si, Prof.Dr. Abdoellah, SE.MM., Prof.Dr. Johanes Basuki, M.Psi. dan Prof.Dr.Taliziduhu Ndraha (Alm), yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya
9. Teman-teman Magister Akuntansi Pancasila dan semua pihak yang namanya tidak dapat dicantumkan satu persatu yang turut membantu kelancaran penyelesaian thesis ini

Dalam penulisan thesis ini, penulis menyadari masih dapat kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik yang konstruktif untuk penyempurnaan selanjutnya.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak-pihak yang memerlukannya.

Jakarta, 25 Januari 2013

(Hendi Prihanto)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja terhadap Efektifitas pada Program Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Indonesia.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pengujian regresi berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian yang terbaik. Variabel dalam penelitian ini adalah anggaran pendapatan dan realisasi belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial sebagai variabel independen dan efektifitas program sebagai variabel dependen. Jumlah populasi penelitian sebanyak 33 provinsi dengan menggunakan purposive sampling, diperoleh sebanyak 12 provinsi sebagai sampel dari tahun 2006 sampai dengan 2010

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Program sebesar 120.163 dan secara parsial X1 sebesar 10.998 dan X2 sebesar 3.688, dengan Koefisien Determinasi yang dijelaskan dalam *adjusted R-Square* sebesar 66.9% artinya variabel efektifitas program dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada. Sisanya sebesar 33.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini. Secara parsial anggaran pendapatan dan realisasi belanja berpengaruh signifikan terhadap efektifitas program. Penelitian ini menunjukan bahwa pengalokasian anggaran dan penyerapan terhadap anggaran dalam realisasi belanja sangat menentukan efektifitas program di wilayah Indonesia.

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan, Realisasi Belanja dan Efektifitas Program.

ABSTRACT

This research aims to demonstrate and explain whether there is an impact on Budget between Revenue and Actual Expenditure to the effectiveness of nine-year basic education program in Indonesia.

The method of analysis utilized in this research study is a quantitative method, with double regression test using classical assumption test to get the best research model. The variables on this study are: revenue and budget realization, which consists of employees' expenditure, spending on goods, capital expenditure and social assistance as independent variables and program's effectiveness as the dependent variable. Total population of the research is 33 provinces, by using purposive sampling then 12 provinces is obtained as samples for period 2006 to 2010.

These results prove that simultaneously Budget and Actual Expenditures significantly influence the effectiveness of the program of 120.163 and partial X1 is 10.998 and X2 is 3.68 , which Coefficient Determination is described in the *adjusted R-Square* of 66.9%; variable of program effectiveness can be explained by existed independent variables. The remaining in 33.1% is influenced by other variables that are not explained by this particular model of study. Partial budget revenues and expenditures realization significantly influence the Program effectiveness. The Research shows that budget allocation and absorption of budget in expenditures to the effectiveness of the program in Indonesia.

Keywords: *Budget Revenue, Actual Expenditure and Program's Effectiveness.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Identifikasi Masalah.....	12
3. Pembatasan Masalah.....	13
4. Rumusan Masalah.....	14
5. Tujuan Penelitian.....	15
6. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS. 16	
1. Kajian Teoritis.....	17
a. Teori Pertanggungjawaban	17
b. Pengertian dan Fungsi Anggaran.....	22
c. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik	27
d. Anggaran Pendapatan.....	30
1). Klasifikasi Pendapatan.....	31
2). Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan.....	35
3). Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan.....	36
e. Anggaran Belanja.....	40
1). Klasifikasi Belanja.....	42

2). Pengakuan dan Pengukuran Belanja.....	44
3). Penyajian dan Pengungkapan Belanja.....	48
4). Pembiayaan Pendidikan	50
f. Efektifitas	52
1). Konsep Efektifitas	52
2). Pengukuran Efektifitas	60
3). Program Pendidikan.....	60
2. Pengembangan Hipotesis.....	68
a. Kerangka Pemikiran.....	68
b. Penelitian Terdahulu.....	69
c. Hipotesis.....	72
BAB III METODE PENELITIAN	74
1. Model dan Desain Penelitian	74
2. Definisi Operasional Variabel.....	75
3. Jenis dan Sumber Data	77
4. Populasi dan Sampel.....	78
5. Metode Pengumpulan data.....	80
6. Metode Analisa Data.....	80
a. Uji Statistik Deskriptif.....	81
b. Uji Asumsi Klasik OLS.....	81
1). Uji Normalitas.....	82
2). Uji Multikolineritas.....	82
3). Uji Heteroskedastisitas.....	83
4). Uji Autokorelasi.....	83
c. Uji Regresi Berganda.....	84

d. Uji Hipotesis (uji F dan t)	85
e. Koefisien Determinasi.....	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
1. Gambaran Data Penelitian.....	89
Hasil Uji Statistik Deskriptif	89
2. Hasil Uji Asumsi Klasik	90
a. Hasil Uji Normalitas	91
b. Hasil Uji Heteroskedastisitas	92
c. Hasil Uji Multikolinieritas	94
d. Hasil Uji Autokorelasi.....	95
3. Hasil Uji Regresi.....	97
4. Hasil Uji Hipotesis.....	98
a. Hasil Uji Simultan (Uji F)	98
b. Hasil Uji Parsial (Uji t).....	99
5. Hasil Uji Determinasi	101
6. Pembahasan Hasil Penelitian	102
a. Pengaruh Anggaran Pendapatan terhadap Efektifitas	102
b. Pengaruh Realisasi Belanja terhadap Efektifitas	103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	105
1. Kesimpulan	105
2. Keterbatasan Penelitian	108
3. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Tabel Tolok ukur APK.....	4
1.2. Tabel Rata-rata Angka Partisipasi Kasar di Indonesia Periode tahun 2006 – 2010	5
1.3. Tabel Anggaran Pendapatan Pendidikan Dasar Pemerintah Pusat Periode tahun 2006 -2010	7
1.4. Tabel Realisasi Belanja Netto Pendidikan Dasar Pemerintah Pusat Periode tahun 2006 – 2010	9
2.1. Tabel Penelitian Terdahulu	70
3.1. Operasional Variabel	76
3.2. Daerah Sampel Penelitian	79
4.1. Deskripsi Data Penelitian.....	89
4.2. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	92
4.3. Hasil Uji Multikolineritas	94
4.4. Pengambilan Keputusan	94
4.5. Hasil Uji Autokorelasi	96
4.6. Hasil Uji Regresi Berganda	97
4.7. Uji Statistik F.....	99
4.7. Uji Statistik t.....	100
4.8. Uji Determinasi	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Rata - rata Angka Partisipasi Kasar Periode Tahun 2006-2010.....	6
1.2. Anggaran Pendapatan Pendidikan Dasar Periode Tahun 2006-2010.....	8
1.3. Realisasi Belanja Pendidikan Dasar Periode Tahun 2006-2010.....	9
2.1. Siklus Penyusunan Anggaran.....	29
2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis	68
4.1. Uji Grafik Histogram	91
4.2. Uji Heteroskedastisitas	93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1.1. Deskripsi Data Penelitian	115
1.2. Hasil Uji Normalitas.....	115
1.6. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	116
1.7. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	116
1.8. Hasil Uji Multikolineritas	117
1.9. Hasil Uji Autokorelasi	117
2.0. Hasil Uji Statistik F.....	117
2.1. Hasil Uji Statistik t.....	118
2.2. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	118
2.3. Rata – rata Angka Partisipasi Kasar Tahun 2006-2010.....	119
2.4. Anggaran Pendapatan Pendidikan Dasar Tahun 2006-2010.....	120
2.5. Realisasi Belanja Netto Pendidikan Dasar Tahun 2006-2010.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan setiap bangsa dan negara yang ada diseluruh dunia, karena pendidikan merupakan modal utama bagi keberhasilan pembangunan di setiap bangsa dan negara, karena bangsa yang maju dan beradab adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan berpendidikan.

Sesuai dengan yang diamanahkan Undang-undang Dasar Negara RI 1945 yang tercantum dalam pembukaan yang berbunyi "... mencerdaskan kehidupan bangsa..." dan tertuang dalam pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan " bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran". Makna yang terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh dalam UUD 45 tersebut adalah, pemerintah selaku pihak penyelenggara negara yang memimpin memiliki tugas, kewajiban dan tanggungjawab untuk memberi dan menyediakan pendidikan kepada setiap warga negaranya, melalui penyelenggaraan sistem pengajaran nasional yang baik, berkualitas, dan sudah tentu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara akuntabel.

Pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dapat didefinisikan sebagai usaha secara sadar, terarah, dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Oleh karenanya

pendidikan menjadi sangat berarti dan memegang peran penting dalam pencapaian visi dan misi bangsa Indonesia.

Kementerian Pendidikan Nasional yang kemudian berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui penjabaran misinya lima K, berupaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan nasional secara akuntabel dengan indikator yang dijadikan pedoman yaitu:

1. Ketersediaan layanan pendidikan
2. Keterjangkauan layanan pendidikan
3. Kualitas/Mutu dan relevansi layanan pendidikan
4. Kesetaraan dalam memperoleh pendidikan
5. Kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan adalah dengan mencanangkan program wajib belajar enam tahun pada PELITA III, yang kemudian secara berkesinambungan dilanjutkan dengan program wajib belajar sembilan tahun yang pelaksanaannya diatur melalui PP No. 28 Tahun 1990. Program tersebut dikatakan sudah berjalan efektif apabila memenuhi persyaratan atau sasaran program yang ditetapkan dalam tujuannya, yaitu diharapkan rakyat Indonesia sudah terbebas dari buta huruf dan sudah tuntas menempuh jenjang pendidikan minimal sembilan tahun.

Faktor yang dapat dijadikan tolokukur berhasil atau tidaknya kinerja program pendidikan dasar sembilan tahun tersebut, dapat dilihat dari indikator pencapaian kinerja pendidikan yang dinyatakan dalam APK (Angka Partisipasi Kasar). APK didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan

sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai, dan dinyatakan dalam persentase. Dalam penelitian ini APK yang dijadikan sebagai tolokukur adalah, APK dari angka kelulusan SMP yang dianggap representatif untuk program wajib belajar sembilan tahun, yang dimulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yang ada pada setiap provinsi di Indonesia.

Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Jika APK makin tinggi nilainya maka hal ini berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah tersebut.

Nilai APK dapat dimungkinkan mencapai lebih besar dari 100 %, karena terdapat murid yang bersekolah berusia di luar usia resmi sekolah yang terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. Pengukuran APK dari program wajib belajar sembilan tahun tersebut dilihat pada jumlah kelulusan anak yang bersekolah pada jenjang SMP. Pengukuran APK yang dilakukan pemerintah dibagi dalam empat kategori, seperti yang terlihat pada tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1
Indikator Pengukuran APK**

No	Kategori APK	Nilai
1.	Tuntas Pratama	80% - 84%
2.	Tuntas Madya	85% - 89%
3.	Tuntas Utama	90% - 94%
4.	Tuntas Paripurna	Min - 95%

Sumber : Kemendiknas

Target dari pembangunan dibidang pendidikan yang diinginkan oleh pemerintah adalah, melalui program wajib belajar sembilan tahun Indonesia telah dapat mencapai tingkatan Tuntas Paripurna. Sedangkan fenomena yang terjadi bila dilihat berdasar dari standar yang ditetapkan diatas adalah :

- a. Rata-rata APK Nasional yang dicapai dalam kurun waktu selama tahun 2006-2010 (Sumber: BPS RI, Susenas 2003-2010) masih berada pada kondisi peringkat yang rendah, yaitu naik dan turun antara kondisi tuntas pratama dan madya, belum mencapai tuntas paripurna.
- b. Rata-rata APK menurut provinsi yang ada di Indonesia (Sumber: BPS RI, Susenas 2003-2010) yang tercantum pada lampiran thesis, kondisi APK pada setiap provinsi yang ada di Indonesia masih banyak yang berada dibawah 80%, khususnya untuk provinsi yang berada diluar pulau Jawa, hal ini menunjukan bahwa program belajar sembilan tahun masih belum merata dan belum efektif penyelenggarannya.
- c. PP No. 28 Tahun 1990. Tentang wajib belajar sembilan tahun semenjak ditetapkannya hingga tahun 2010, belum mencapai sasaran dan tujuan yang di inginkan.
- d. Berdasar pada fenomena diatas program wajib belajar sembilan tahun belum dapat disimpulkan sudah berjalan efektif.

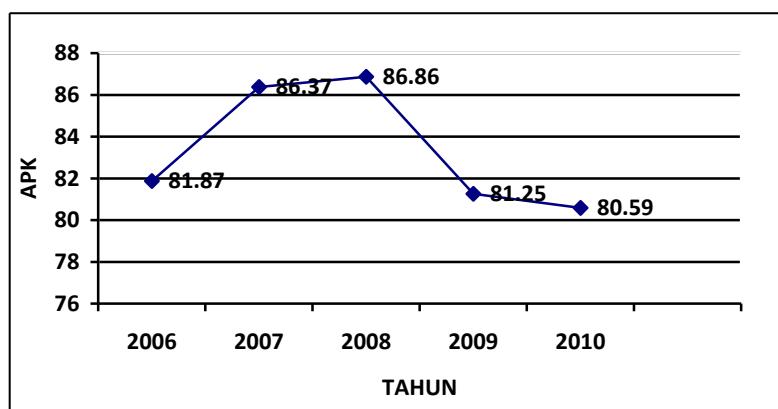
Data Angka Partisiasi Kasar nasional yang mendukung fenomena yang tersebut diatas dapat dilihat pada tabel 1.2 dan gambar 1.1 berikut :

Tabel 1.2
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar (SMP)
Indonesia Periode (2006-2010)
(dalam Persen)

Keterangan	Rata-rata APK	Keterangan
Tahun 2006	81.87	Tuntas Pratama
Tahun 2007	86.37	Tuntas Madya
Tahun 2008	86.86	Tuntas Madya
Tahun 2009	81.25	Tuntas Pratama
Tahun 2010	80.59	Tuntas Pratama

Sumber : BPS dan Kemendiknas Tahun 2006-2010

Gambar 1.1
Grafik Rata-rata Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar
Indonesia Periode 2006 – 2010
(dalam Persen)



Jika dilihat data di atas, kinerja Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dapat dikatakan belum memenuhi kriteria efektif, karena pada grafik yang menunjukkan persentase kinerja yang dicapai APK tahun 2006-2010 mengalami fluktuasi yang cenderung menurun, bahkan dapat disimpulkan masih belum mencapai peringkat tuntas paripurna.

Terkait dengan fenomena persoalan tersebut diatas dan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui APBN dan APBD,

telah memutuskan dan diimplementasikan melalui undang-undang, yaitu pengalokasian biaya pendidikan sebesar 20 % (persen) dari APBN/APBD yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti yang diamanahkan dalam UU Otonomi Daerah. Pengalokasian anggaran tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan agar dapat terlaksana secara baik.

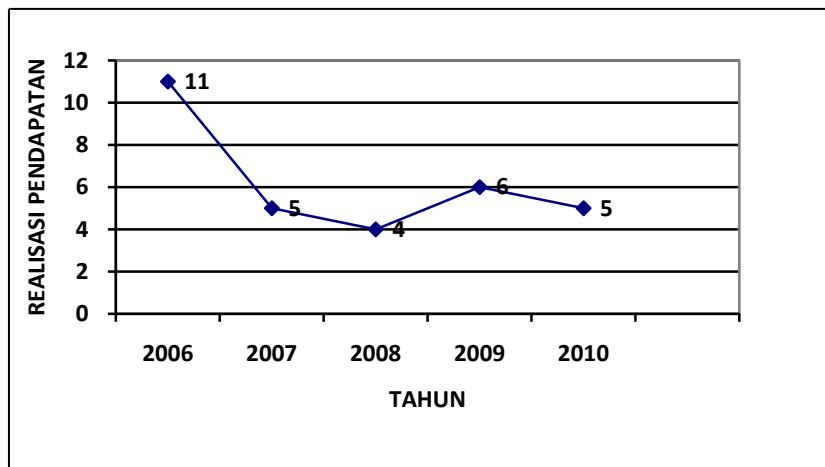
Anggaran pendapatan sebagai salah satu faktor yang digunakan untuk menunjang kegiatan program. Data mengenai anggaran tersebut diperoleh dari LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) tahun 2006-2010, yaitu dana dekonsentrasi sebagai dana yang berfungsi sebagai perwakilan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka desentralisasi atau otonomi daerah, yang diklasifikasikan menurut fungsi, sub fungsi dan program, yaitu pada pengalokasian program pendidikan dasar sembilan tahun seperti pada gambar 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Anggaran Pendapatan Pendidikan Dasar
Pemerintah Pusat Periode (2006-2010)
(dalam rupiah dan persen)

Keterangan	Pendapatan	Total Anggaran	%
Tahun 2006	23.166.278.356.000	214.238.990.550.000	11
Tahun 2007	21.346.244.094.120	498.172.161.850.000	5
Tahun 2008	24.964.789.382.000	697.071.006.590.000	4
Tahun 2009	38.297.496.813.000	728.076.346.122.000	6
Tahun 2010	34.735.088.743.000	781.533.546.832.000	5

Sumber : LKPP Tahun 2006-2010

Gambar 1.2
Grafik Anggaran Pendapatan Pendidikan Dasar
Pemerintah Pusat Periode 2006-2010
(dalam persen)



Sumber : LKPP periode 2006-2010

Data tersebut di atas dapat diinterpretasikan, bahwa pengalokasian jumlah dana bagi kegiatan pendidikan setiap tahunnya mengalami perubahan yaitu kenaikan dan penurunan anggaran, perubahan naik turunnya anggaran pendapatan tersebut sangat dipengaruhi salah satunya oleh jumlah kebutuhan masing-masing daerah. Semakin banyak anggaran pendapatan yang di peroleh, berarti akan semakin besar kebutuhan pendidikan tersebut.

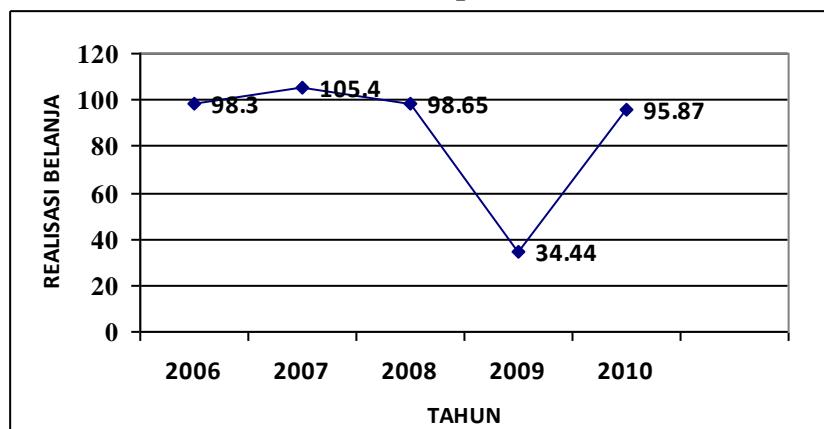
Terkait dengan data anggaran pendapatan diatas, maka didapat pula data realisasi belanja yang dilakukan pemerintah pusat berdasarkan fungsi, sub fungsi pada program pendidikan dasar yang direncanakan oleh pemerintah, serta penggunaannya dalam bentuk belanja netto dan penyerapannya terhadap anggaran, dapat dilihat pada tabel 1.4 dan gambar 1.3 berikut ini :

Tabel 1.4
Belanja Netto Pendidikan Dasar
Pemerintah Pusat Periode (2006-2010)
(dalam rupiah dan persen)

Keterangan	Belanja	Penyerapan
Tahun 2006	22.773.923.535.698	98.30
Tahun 2007	22.494.523.477.760	105.4
Tahun 2008	24.627.540.642.663	98.65
Tahun 2009	13.191.137.005.377	34.44
Tahun 2010	33.301.680.973.471	95.87

Sumber : LKPP Tahun 2006-2010

Gambar 1.3
Grafik Belanja Netto Pendidikan Dasar
Periode 2006-2010
(dalam persen)



Sumber: LKPP tahun 2006-2010

Data di atas dapat diinterpretasikan bahwa penyerapan terhadap anggaran pendapatan melalui realisasi belanja, ditemukan terdapat penggunaan anggaran yang melebihi dana pagu anggaran yang ditetapkan, dan juga terdapat penyerapan anggaran di bawah rata-rata dana pagu anggaran yang ditetapkan.

Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan, akan menimbulkan permasalahan tersendiri dan tentunya dapat mempengaruhi

kinerja program dan organisasi, begitupula dengan akuntabilitas organisasi selaku perencana dan pelaksana anggaran tersebut.

Anggaran pendidikan berdasar pada kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah, dikelola dengan peruntukan bagi Anggaran di Pusat dan Anggaran di Daerah yang berbentuk Dana Alokasi Umum, yaitu merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Mardiasmo: 2002). Peranan dana alokasi umum terletak pada kemampuannya menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-undang No 33 Tahun 2004)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti yang membahas topik terkait tentang variabel anggaran dan efektifitas, maka diperoleh serangkaian hasil penelitian terkait dengan memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Granita Quartiana (2003), membahas mengenai Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja, mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah dana pendidikan yang dikeluarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap pencapaian kinerja, walaupun hasil yang dicapai belumlah efisien dan efektif .

Novia Andriana (2011) membahas tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Realisasi Tata Kelola Anggaran Pembangunan, dapat diketahui bahwa anggaran pendidikan yang dikelola dan teralokasikan 100%, dengan kata lain apa yang sudah dianggarkan konsisten dengan

realisasi pembangunan pendidikannya yang ada, sehingga tercapai kinerja yang efektif seperti yang diharapkan, selain dari anggaran dibutuhkan pula partisipasi masyarakat yang besar dalam pembangunan sektor pendidikan, alokasi anggaran relatif kecil mempengaruhi pula kinerja pendidikan.

Nina Toyamah dan Syaikhu Usman (2003) membahas tentang pengelolaan Anggaran Pendidikan terhadap pengelolaan layanan pendidikan mengemukakan bahwa pelayanan atas pendidikan bukan saja dipengaruhi oleh anggaran tetapi juga oleh konsistensi pemerintah dalam mengelola anggaran yang telah direncanakan sehingga untuk menghasilkan kinerja yang efektif, baik dibutuhkan keselarasan antara anggaran dan partisipasi masyarakat.

Kunwaviyah Nurcahyani (2010) membahas tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial organisasi, mengemukakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektifitas kinerja dan komitmen organisasi.

Siti Musyarofah (2006) membahas tentang partisipasi anggaran terhadap kinerja eksekutif publik dan moral hazard sebagai variabel pemoderasi mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi anggaran dan moral hazard terhadap efektifitas kinerja eksekutif publik yang dicapai.

Robinson (2006), membahas tentang pengaruh kualitas anggaran terhadap efektifitas pengawasan menyatakan, bahwa secara bersama-sama, kejelasan anggaran, evaluasi anggaran, dan keakuratan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengawasan anggaran.

Lingga Purnamasari (2006), membahas tentang pengaruh karakteristik anggaran terhadap efektifitas pelaksanaan anggaran menyatakan, partisipasi, kesulitan, evaluasi, umpan balik anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan anggaran.

Peneliti, berdasar pada hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel penelitian dan telah dilakukan, maka tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan karya ilmiah dalam bentuk thesis dengan judul:

**PENGARUH ANGGARAN TERHADAP EFEKTIFITAS PROGRAM
(Hasil Kajian Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada
Periode 2006 – 2010)**

2. Identifikasi Masalah

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif, yang akan menguji variabel terikat yaitu efektifitas program yang dipengaruhi oleh sejumlah variabel bebas yaitu anggaran pendapatan dan realisasi belanja. Variabel Realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial pada tahun 2006-2010. Sehingga peneliti dapat mengidentifikasi sejumlah permasalahan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar masih belum menunjukkan hasil yang maksimal
2. Anggaran pendapatan mempengaruhi efektifitas program
3. Pelaksanaan program disetiap provinsi masih sangat tergantung oleh transfer dana pemerintah pusat
4. Belanja pegawai berpengaruh secara positif terhadap efektifitas program

5. Belanja barang berpengaruh secara positif terhadap efektifitas program
6. Belanja modal berpengaruh secara positif terhadap efektifitas program
7. Bantuan sosial berpengaruh secara positif terhadap efektifitas program
8. Penyerapan terhadap anggaran pendapatan dan belanja belum maksimal
9. Anggaran pendapatan dan belanja berpengaruh positif terhadap efektifitas program pendidikan
10. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja belum maksimal sehingga berpengaruh terhadap efektifitas program

3. Pembatasan Masalah

Berdasar pada indentifikasi masalah tersebut diatas, penelitian akan dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas program, salah satunya difokuskan pada anggaran pendapatan dan realisasi belanja negara. Penelitian ini mengkaji pengaruh anggaran pendapatan dan realisasi belanja pemerintah pusat menurut program, kegiatan, dan jenis belanja yang mempengaruhi program wajib belajar sembilan tahun.

Data tersebut diakses melalui website Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Biro Pusat Statistik. Karena keterbatasan waktu dan serta data yang diperoleh penulis, maka data yang digunakan adalah data pada Tahun 2006 sampai dengan 2010. Dengan demikian pembatasan masalah sesuai dengan indentifikasi masalah di atas adalah pada pengaruh Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja, sebagai faktor yang mempengaruhi Efektifitas Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Periode 2006 - 2010.

4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian di atas, adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja terhadap Efektifitas Program secara simultan?
2. Apakah terdapat pengaruh Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja terhadap Efektifitas Program secara parsial?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah penelitian adalah:

1. Untuk membuktikan dan menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja berpengaruh terhadap Efektifitas Program secara simultan
2. Untuk membuktikan dan menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja berpengaruh terhadap Efektifitas Program secara parsial

6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan informasi dan kontribusi yang diperoleh penelitian ini diharapkan berguna bagi :

- a. Akademik

Dari Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tambahan literatur dan bahan kajian dalam mengembangkan ilmu akuntansi pemerintahan lebih lanjut, yang diharapkan memiliki kemampuan

mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, menyimpulkan, dan mengevaluasi tentang pengaruh anggaran dan realisasi belanja secara simultan dan parsial.

b. Peneliti Lain

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian dan tambahan literatur bagi peneliti lain, dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, untuk memperbaiki alokasi anggaran pendapatan dan memperbaiki realisasi belanja sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Kajian Teoritis

a. Teori Pertanggungjawaban

Accountability secara umum mengandung pengertian dapat dipertanggungjawabkan, bertanggung jawab atau dapat dikenakan tanggungjawab atau bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Miriam Budiardjo mengartikan bahwa *accountability* merupakan pertanggungjawaban dari pihak yang diberi *mandate* untuk memerintah, kepada mereka yang memberi mandat. Dalam hal ini, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pihak lain, dan pihak lain yang dimaksudkan tersebut adalah pemerintah.

Pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat, ini yang dinamakan sebagai kedaulatan rakyat. Lebih lanjut *accountability* dapat ditafsirkan secara luas, yaitu sebagai pertanggungjawaban politik. Meskipun diakui bahwa secara asasi pertanggungjawaban dalam sistem pemerintahan hanya terdapat dalam tatanan demokratis, dalam praktek mungkin didapati pada tatanan politik kediktatoran atau otoriter. Tetapi yang tidak didapati dalam kediktatoran atau otoriter adalah kebebasan menilai pertanggungjawaban dan konsekuensi yang dapat timbul dari pertanggungjawaban tersebut. Dalam sistem kediktatoran atau otoriter tidak ada kebebasan menilai. Kalaupun ada penilaian, semata-mata

untuk menilai pemberian segala tindakan pemerintah, begitu pula halnya dengan konsekuensi penilaian, tidak dimungkinkan untuk sampai pada menyatakan tidak percaya pada pemerintah atau bersikap tidak akan memberi dukungan lebih lanjut di masa datang.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan laporan kepada pihak lain tentang apa yang mereka lakukan atau tidak mereka lakukan, akuntabilitas juga menyangkut pertanggungjawaban kepada semua pihak yang berkepentingan (Jones 2000). Sedangkan Hatry, 1980:164 mengemukakan Akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan digunakan secara legal.

Mengacu pada tiga pilar utama yang menjadi persyaratan akuntabilitas yaitu *Pertama*, adanya transparansi dalam menetapkan kebijakan dan menerima masukan dan mengikuti sertakan berbagai institusi. *Kedua*, adanya standar kinerja yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang. *Ketiga*, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana yang kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah pusat dan daerah sudah seharusnya melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi pada saat ini pengelolaan keuangan negara masih memperihatinkan, anggaran khususnya pengeluaran

melalui realisasi belanja belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan daerah. Disamping masih banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomis, efisien dan efektif.

Dimensi reformasi lembaga sektor publik, seperti pemerintah daerah, departemen, dan lembaga dibawahnya dalam rangka pemberian pelayanan publik (*public service*) harus mengacu pada indikator ekonomis, efisien dan efektif yaitu dengan memberikan otonomi dan desentralisasi tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kepada pemerintah daerah. Pemberian otonomi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah, namun harus diperhatikan bahwa pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dalam menggunakan dana tersebut, harus diikuti dengan pemberian diskresi kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dana sesuai dengan prioritas dan aspirasi pemerintah daerah (Mardiasmo : 2002)

Agar pengelolaan dana masyarakat yang sangat besar tersebut dilaksanakan secara transparan dengan memperhatikan VFM (*value for money*), maka diperlukan peraturan pelaksanaan dan pemeriksaan yang lebih konkret dan tegas. Titik berat peraturan tersebut adalah koreksi total semua kesalahan dimasa lalu dan pelaksanaan VFM audit bertujuan untuk menjamin dikelolanya uang rakyat secara ekonomis, efisien, efektif akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah pusat, akan tetapi juga dilakukannya *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk *horizontal accountability*.

Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya, dan diberi penjelasan.

Bentuk pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah dapat bermacam-macam, Ellwood dalam Mardiasmo (226:2002), menggolongkan menjadi 4 macam yaitu :

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Peraturan (*accountability for probity and legality*)
- 2) Akuntabilitas Proses (*process accountability*)
- 3) Akuntabilitas Program (*program accountability*)
- 4) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Dalam penelitian ini yang terkait dengan variabel dalam penelitian adalah akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang

minimal. Akuntabilitas program juga berkaitan dengan hasil dari operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian akuntabilitas program berkaitan dengan kepemilikan (property) unit-unit dan birokrat secara individual yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektifitas program. Kendatipun agen eksternal seperti lembaga legislatif dapat melakukan penyelidikan tentang program-program yang ditetapkan.

Sedangkan akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah. Audit terhadap pertanggungjawaban keuangan menurut Malan, 1984 dalam Maradiasmo, lebih menekankan pada :

- 1) Audit sebagai suatu proses yang sistematis
- 2) Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
- 3) Asersi atas tindakan dan kegiatan ekonomi
- 4) Kesesuaian dengan kriteria/standar yang telah ditetapkan
- 5) Melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Tahap pelaporan dan evaluasi merupakan tahap akhir dari siklus anggaran, dari tahap ini akan dihasilkan umpan balik (*feed back*) yang menjadi tahap perencanaan siklus tahun anggaran berikutnya. Untuk menghasilkan kualitas pertanggungjawaban pemerintah yang baik maka diperlukan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian manajemen, dan sistem informasi keuangan. Dan agar pelaporan dapat menghasilkan kualitas yang akuntabel, maka sebaiknya perlu dilibatkan pihak-pihak

yang profesional dan independen untuk menilai pertanggungjawaban tersebut.

b. Pengertian dan Fungsi Anggaran

Isu penting yang menjadi sorotan publik seringkali muncul dalam proses penyusunan anggaran, adakalanya anggaran yang direncanakan maupun yang telah dilaksanakan sarat dengan muatan kepentingan politik untuk mencapai tujuan dari partai penguasa untuk mempertahankan kekuasaanya dan mengalahkan lawan politiknya.

Peran anggaran dalam organisasi memiliki suatu peranan yang amat strategis yang berfungsi mengelola kekayaan sumber daya suatu organisasi publik. Hal ini dinyatakan oleh Mulyadi (2001:488), mendefinisikan anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Sedangkan Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (1989:6) mengungkapkan bahwa, anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan.

Definisi lain yang dikemukakan menurut Freeman (2004), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*).

Hakikatnya pemerintah selaku penyelenggara negara berkeinginan memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan kepada

masyarakatnya, namun hambatan yang sering dihadapi adalah terbatasnya sumber daya dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara tersebut. Anggaran, selain sebagai alat yang digunakan dalam mencapai tujuan, juga dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama jangka waktu/periode tertentu, yang pengukurannya dinyatakan dalam finansial dan proses pembuatannya cukup rumit dikarenakan berisikan estimasi-estimasi .

Anggaran, dalam sektor publik, merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik, tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan berorientasi pada kinerja akan mengagalkan rencana yang sudah disusun (Mardiasmo 2002:61)

Deddy Nordiawan, Iswayudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati (2007:20), menyatakan bahwa bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Anggaran, dalam pengertian lain dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan :

- 1). Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktifitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
- 2). Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.

- 3). Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pendidikan tersebut.

Mardiasmo (2002:63), menyatakan bahwa dalam ruang lingkup ilmu akuntansi sektor publik, anggaran berada dalam bagian lingkup akuntansi mempunyai beberapa fungsi. Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik adalah:

- 1). Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*).

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, yang digunakan untuk:

- a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,
- b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya
- c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun dan,
- d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat perencanaan strategi.

- 2). Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran sebagai alat untuk pengendalian anggaran, memberi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam mengalokasikan anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.

3). Anggaran sebagai alat kebijakan (*Fiscal Tool*)

Anggaran pemerintah, dalam fungsinya sebagai alat kebijakan fiskal, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat mengetahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.

4). Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*)

Anggaran, dalam fungsi sebagai alat politik, digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

5). Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordintion and Comunication Tool*)

Anggaran publik yang disusun merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan, anggaran publik yang disusun dengan baik mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi, oleh karena itu anggaran harus dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6). Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Perforance Measururement Tool*)

Anggaran sebagai suatu alat ukuran yang digunakan untuk menilai komitmen *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran

7). Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efisien dan efektif dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan

- 8). Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*public sphere*)

Penyusunan anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPR/MPR, Masyarakat, perguruan tinggi dan berbagai organisasi masyarakat harus terlibat dalam penganggarannya. Tujuannya adalah agar aspirasi dari masing-masing elemen dapat tersalurkan.

c. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2002:66) menyatakan anggaran sektor publik dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Anggaran Operasional (*Operation/recurrent budget*) , yaitu anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari untuk menjalankan pemerintahan yang biasa disebut belanja rutin
- 2) Anggaran Modal/Investasi. (*Capital/Investment Budget*), yaitu anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, belanja investasi dan modal adalah adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah biaya rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

Bachtiar Arief, Muchlis, dan Iskandar (2008:125) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan anggaran :

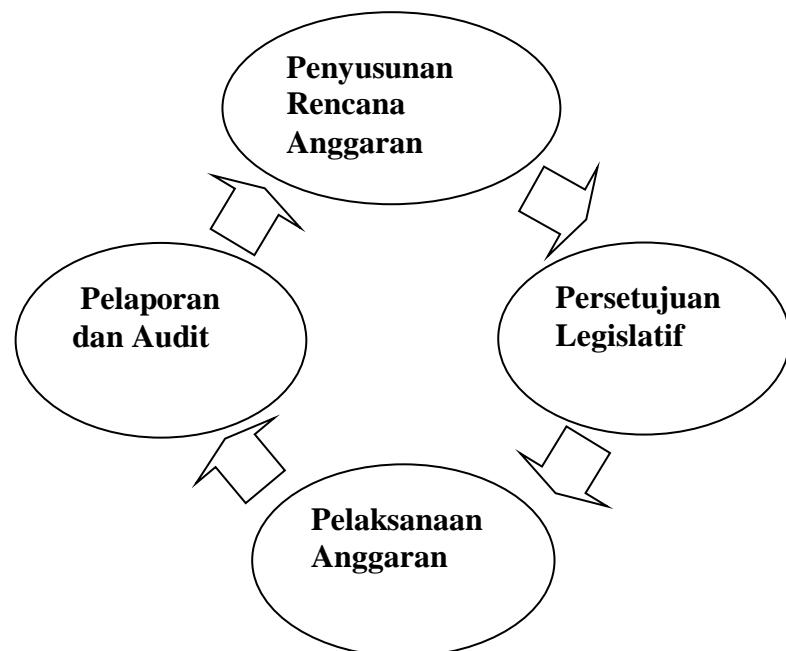
- 1) Kondisi Perekonomian (*economic wealth*) negara, apakah memungkinkan untuk mencapai proyeksi pendapatan dan belanja tahun depan. Ekonomi yang tidak stabil seperti laju inflasi yang tidak terkendali, suku bunga yang tinggi, dan nilai mata uang yang bergejolak tidak menentu merupakan unsur yang sangat berpengaruh dalam anggaran.
- 2) Struktur Politik, seperti sistem politik, tingkat korupsi, pengantian struktur pemerintahan, karakter pemerintah dan kabinet dan jumlah serta kekuatan dari kelompok penekan (*pressure groups*) menentukan dalam penganggaran karena anggaran dikenal sebagai alat politik.
- 3) Ketidak-imbangan antara belanja dan pendapatan yang sangat besar merupakan faktor penentu dalam anggaran.

Kelangkaan sumber pendapatan dan jumlah anggaran belanja yang diajukan harus pula menjadi perhitungan cermat. Menteri keuangan bertugas untuk menyusun prioritas dan memangkas usulan anggaran belanja. Hal ini memungkinkan “*moral hazard*” dan “*adverse selection*” yang dilakukan pejabat dan pelaksana di Departemen Keuangan/Kementerian Keuangan. Wildavsky (1975) telah mengidentifikasi adanya perendahan (*underestimating*) anggaran pendapatan dan melakukan negosiasi yang tidak wajar dengan unit pemerintah lain. Pertimbangan persetujuan anggaran

belanja sering kali tidak didasarkan atas kebutuhan dan ekonomi, tetapi bergantung pada hasil negosiasi.

Anggaran pemerintah, seperti halnya pada akuntansi sektor swasta, juga memiliki pola atau siklus dalam penyusunan anggaran, siklus tersebut merupakan alur penyusunan anggaran dimulai dari tahap penyusunan anggaran, persetujuan anggaran tersebut oleh badan legislatif, pelaksanaan anggaran oleh lembaga/kementerian terkait, dan diakhiri dengan pelaporan penggunaan atas anggaran tersebut yang kemudian dilakukan audit atas pelaporannya. Siklus tersebut dapat digambarkan dalam gambar 2.1 sebagai berikut :

**Gambar 2.1
Siklus Penyusunan Anggaran**



d. Anggaran Pendapatan

Langkah mencapai keberhasilan terhadap penyelenggaraan suatu visi dan misi yang dituangkan dalam rencana dan program kerja, tentulah disertai oleh faktor keuangan yang mendukung kegiatan operasional

dalam terselenggaranya tujuan dari program tersebut. Kegiatan kependidikan demikian juga, anggaran sangat diperlukan dalam mencapai keberhasilan program, implementasi kebijakan serta tujuan yang terkandung didalamnya untuk mendukung tercapainya akuntabilitas pendidikan.

Pengelompokan berdasar pada objek, fungsi, organisasi, sifat/karakter, dan kehematan terdapat dalam anggaran. Anggaran diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu anggaran berdasarkan pendapatan dan belanja, anggaran pendapatan di dalamnya terdapat pengelompokan anggaran yang didasarkan atas pendapatan yang telah diklasifikasikan memuat berbagai jenis pendapatan dari berbagai sektor pendapatan negara yang ada seperti perpajakan, sumber daya alam, perdagangan dan lain-lain.

Definisi pendapatan, menurut ilmu akuntansi telah dikemukakan dalam PSAP No 01 dan 02, PP 24 Tahun 2005, adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Definisi lain yang dikemukakan menurut PSAK bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus kas masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pendapatan (revenue) dan penghasilan (income) sering kali disamakan dalam kehidupan sehari-hari, namun sebenarnya pendapatan

dan penghasilan adalah dua hal yang berbeda, secara konsep maupun secara praktek penghasilan memiliki dimensi dan indikator yang berbeda.

Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati (2007:180), menyatakan bahwa penghasilan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

1). Klasifikasi Pendapatan

Tujuan utama pengklasifikasian pendapatan adalah untuk mempermudah pembaca dan pengguna laporan keuangan dalam memahami isi laporan keuangan yang disajikan. Dengan adanya klasifikasi, maka dapat dilihat dengan jelas berapa besar pendapatan untuk tiap jenis bidang usaha yang dilakukan.

PP Nomor 71 tahun 2010 mengandung definisi bahwa pendapatan menjadi dua kategori, yaitu pendapatan LO (laporan operasional) dan pendapatan LRA (laporan realisasi anggaran). Pendapatan LO merupakan item-item pendapatan yang dilaporkan dalam Laporan Operasional, sedangkan pendapatan LRA merupakan item-item pendapatan yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini merupakan hasil dari penggunaan basis akrual yang membutuhkan pelaporan atas transaksi operasional dan sekaligus mengakomodasi pelaporan dalam realisasi anggaran yang masih memiliki kemungkinan disusun dengan basis kas. Definisi

pendapatan LO dalam PP Nomor 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

“Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.”

Definisi pendapatan LRA adalah sebagai berikut: “Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.”

Menurut PP 24 tahun 2005 dan 71 Tahun 2010 serta Bahtiar Arief, Muchlis dan Iskandar (2009) mengemukakan bahwa pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut :

a). Pendapatan Pemerintah Pusat

(1). Pendapatan Perpajakan

Pendapatan perpajakan merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri antara lain pajak penghasilan (migas dan nonmigas), pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTP, cukai dan pajak lainnya, sedangkan pajak perdagangan internasional antara lain bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

(2). Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan pendapatan pemerintah pusat yang bersumber dari luar perpajakan. Termasuk pendapatan negara bukan pajak antara lain,

penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNBP pajak antara lain, penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya.

(3). Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Merupakan pemberian sukarela (*voluntary*) dari pihak lain yang umumnya tidak bisa dipaksakan atau dikenakan denda, bunga, atau pinalti lain jika batal diberikan. Pendapatan hibah bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dari pemerintah, perorangan, maupun dari sektor swasta.

b). Pendapatan Pemerintah Daerah (Pemda)

(1). Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Pendapatan jenis ini mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

(2). Pendapatan Transfer

Pendpatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pendapatan trasnsfer lainnya.

(3). Pendapatan Lain-lain yang sah

Pendapatan Lain-lain yang sah merupakan pendapatan yang tidak dapat diklarifikasi kedalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Termasuk pendapatan jenis ini

adalah: hibah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana, bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

2). Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Penggunaan basis akrual berpengaruh pada saat pengakuan atas pendapatan dan beban. Pengakuan dilakukan saat kejadian atau transaksi benar-benar terjadi, tidak hanya saat kas diterima atau dibayarkan. Namun penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah masih kesulitan dalam menerapkan basis akrual. Oleh karena itu, PP Nomor 71 tahun 2010 oleh karena itu mengakomodasi kemungkinan penyusunan anggaran berbasis kas maupun akrual.

Pengakuan atas pendapatan LO dilakukan pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Prinsip pengakuan ini telah mengadopsi basis akuntansi akrual penuh. Pengakuan pendapatan LRA dilakukan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pendapatan dalam LRA masih mengakomodasi penggunaan akuntansi berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan secara umum dapat diakui ketika :

- a) Diperoleh (*earned*), yaitu ketika entitas telah menyelesaikan secara substansial apa yang menjadi kewajibannya. Penyelesaian

kewajibannya inilah yang akan menjadi pendapatan ketika seluruh proses selesai.

- b) Sudah direalisakan/dapat direalisasikan (*realized/realizable*) yaitu ketika kas/hak tagih (piutang) sudah diterima atas penyerahan barang/jasa (*realized*) atau ketika jumlah kas/hak tagih (piutang) sudah dapat ditentukan atas penyerahan barang/jasa tersebut (*realizable*).

Kedua prinsip pengakuan tersebut dapat diterapkan dalam kondisi akuntansi yang berbasis akrual. Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia, seperti yang diatur dalam PP 71 tahun 2010, prinsip pengakuan pendapatan menggunakan basis akrual (*accrual basis*).

3). Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan

a). Akuntansi Pendapatan LRA

Ketentuan atas pendapatan LRA yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran menurut PP Nomor 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- (1). Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- (2). Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (3). Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- (4). Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b). Akuntansi Pendapatan LO

Pendapatan yang dilaporkan dalam Laporan Operasional, menurut PP No 71 Tahun 2010, merupakan pendapatan yang diakui, dicatat, dan dilaporkan dengan basis akrual. Pendapatan dalam Laporan Operasional diakui pada saat:

- (1). Timbulnya hak atas pendapatan;
- (2). Pendapatan direalisasi, yaitu pada saat aliran masuk sumber daya ekonomi.

Akuntansi atas item-item pendapatan dalam Laporan Operasional berbasis akrual adalah sebagai berikut:

- (1). Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- (2). Pendapatan LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- (3). Pendapatan LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- (4). Pendapatan LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

- (5). Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah.
- (6). Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (7). Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- (8). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (9). Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- (10). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (11). Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas pendapatan LO yang terjadi pada periode

penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

- (12). Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Didalam akuntansi pemerintah pendapatan adalah merupakan kelompok pertama yang harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam penyajiannya pendapatan dilaporkan sesuai dengan kelompok klasifikasinya dalam laporan keuangan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk susunan anggaran pendapatan pemerintah pusat terdiri dari Pendapatan Perpajakan yaitu pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak seperti : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, BPHTP, cukai, bea masuk, pajak impor dan pendapatan pajak lainnya. Kemudian setelah pendapatan dari perpajakan diuraikan lalu diuraikan pula Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Komponen Pendapatan untuk Pemerintah Kota/Kabupaten, terdiri dari

- (1). Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan.
- (2). Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Transfer yaitu terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan : Dana Bagi

Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,

(3). Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

(4). Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah :

(1). Kebijakan Akuntansi yang dibuat untuk pendapatan

(2). Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dan rincian lebih lanjut dari jenis pendapatan

(3). Perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai perbedaan yang sah.

e. Anggaran Belanja

Anggaran lain yang merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kegiatan dalam akuntansi pemerintahan adalah anggaran belanja. Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sandi Putra dan Maulidah Rahmawati (2007:187) menyatakan bahwa belanja dilingkungan akuntansi komersil dapat didefinisikan sebagai arus keluar dari aset atau segala bentuk penggunaan asset yang terjadi selama periode tertentu yang berasal dari produksi barang, penyerahan jasa, atau aktivitas lain yang terjadi dalam kegiatan operasional entitas.

Definisi dalam ilmu akuntansi menurut Accounting Principle Board (APB) statement No 4, belanja didefinisikan sebagai jumlah yang diukur dalam uang dari kas yang dikeluarkan atau properti lain yang ditransfer,

modal saham yang dikeluarkan, jasa yang diberikan, atau kewajiban yang terjadi dalam hubungannya dengan barang atau jasa yang telah atau akan diterimakan.

Definisi di atas adalah merupakan penjelasan belanja menurut akuntansi sektor swasta (privat) yang menggunakan basis akrual dalam pelaporannya. Definisi lain yang disesuaikan dengan lingkungan pemerintahan yang saat itu menggunakan basis kas menuju akrual (Cash Toward Accrual) untuk akuntansi pemerintahan perlu ada karena sangat penting artinya guna memberikan kejelasan mengenai batasan pengunaannya.

PP No 71 tahun 2010 mengandung ketentuan bahwa belanja dilingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia mendefinisikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

1). Klasifikasi Belanja

Beban atau belanja umumnya dalam praktek akuntansi komersil (privat), diklasifikasikan menjadi dua hal, yaitu beban langsung dan beban tidak langsung. Beban Langsung adalah beban yang timbul terkait dengan penjualan barang dan jasa. Beban ini umumnya dikenal dengan beban pokok penjualan (*cost of good sold*) untuk perusahaan yang menjual barang atau beban jasa (*cost of services*) untuk perusahaan yang menyediakan jasa. Sedangkan

Beban tidak langsung adalah semua beban yang tidak berhubungan secara langsung dengan proses penjualan, beban ini dikenal dengan nama beban umum dan administrasi (*general and administrative expense*)

Beban langsung maupun tidak langsung selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokan lagi sesuai dengan jenis bebannya, pada klasifikasi beban penjualan umumnya mengikuti klasifikasi pendapatan sesuai dengan jumlah yang diklasifikasikan, misal jika klasifikasi pendapatan ada lima maka beban penjualan diklasifikasikan menjadi lima pula.

PP No 24 Tahun 2005, 71 Tahun 2010 dan Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sandi Putra, dan Maulidah Rahmawati (2007:187) mengemukakan pengklasifikasian belanja menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi Ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan lain-lainnya. Klasifikasi pada pemerintah daerah (pemda) meliputi belanja pegawai, barang modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

b) Klasifikasi berdasarkan Organisasi

Klasifikasi berdasarkan Organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Belanja per-kemeterian Negara/lembaga serta unit organisasi di bawahnya untuk pemerintah pusat. Belanja untuk pemerintah daerah digolongkan menjadi belanja sekretariat DPRD, sekretariat daerah provinsi/kota/kabupaten, dinas pemerintah tingkat provinsi/kota/kabupaten, dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi/kota/kabupaten.

c) Klasifikasi menurut Fungsi

Klsisfikasi menurut Fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi berdasarkan fungsi adalah belanja pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama dan pendidikan

2). Pengakuan dan Pengukuran Belanja

Belanja atau yang disebut juga dengan beban memiliki pengertian yang berbeda dengan biaya. Biaya (*cost*)adalah sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset, sedangkan beban (*expense*) atau belanja adalah biaya yang sudah terjadi. Menurut PP 24 Tahun 2005 mengandung ketentuan bahwa, belanja diakui ketika terjadi pengeluaran oleh kas bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengakuan belanja menurut Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah (2007:189) dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu berdasarkan sumber dana asal yang digunakan untuk pelaksanaan belanja tersebut, kedua hal tersebut adalah:

- a) Pengeluaran belanja melalui rekening kas umum negara/daerah diakui ketika terjadi arus kas keluar dari rekening tersebut.
- b). Pengeluaran belanja melalui kas dibendahara pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perpendaharaan, atau dengan kata lain SPJ Pengeluaran dinyatakan definitif.

PP No 71 tahun 2010 mengandung ketentuan bahwa pengakuan atas belanja adalah sebagai berikut :

- a). Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
- b). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perpendaharaan.
- c). Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum
- d) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi (jenis belanja), organisasi dan fungsi

- e) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- f) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- g) Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah bantuan sosial
- h) Realisasi Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- i) Realisasi Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, asset tak berwujud.
- j) Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penaggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan pusat/daerah.

- k) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas laporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah
- l) Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi penguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi dilingkungan pemerintah pusat antara lain belanja kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi dibawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi dipemerintah daerah antara lain Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Secretariat Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pemerintah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pemerintah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- m) Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- n) Relisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- o) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
- p) Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat

dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektifitas dan efisiensi belanja tersebut.

Halim (2008:73), mengemukakan bahwa ” Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang sifatnya rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok biaya administrasi dan umum.” Koreksi terhadap belanja di tahun anggaran berjalan sangat mungkin terjadi.

3). Penyajian dan Pengungkapan Belanja

Belanja dalam prakteknya akuntansi pemerintahan, pada PP No 24 Tahun 2005 dan 71 Tahun 2010, disajikan pada laporan Realisasi Anggaran dilaporkan setelah pendapatan. Belanja, dalam laporan dikelompokkan menjadi belanja operasi, modal dan tak terduga. Anggaran Belanja Pemerintah pusat terdiri dari:

- a) Belanja Operasi, yaitu yang termasuk dalam kelompok belanja ini adalah belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan lain-lain.
- b) Belanja Modal, yang termasuk dalam kelompok belanja ini adalah belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja asset tetap lainnya dan belanja aset lainnya

Pada Anggaran Belanja Pemerintah Kota/Kabupaten terdiri dari:

- a) Belanja Operasi, yaitu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial

b) Belanja Modal yaitu terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan meliputi :

- a) Kebijakan akuntansi untuk belanja
- b) Rincian belanja dan perbandingan dengan anggaran tahun yang bersangkutan.

Perbedaan antara realisasi dan anggaran harus dijelaskan penyebabnya.

Anggaran walaupun bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pencapaian akuntabilitas, namun anggaran merupakan suatu instrument yang penting didalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Anggaran, dalam dunia bisnis maupun pada organisasi pemerintahan, merupakan bagian penting dalam aktivitas yang dilakukan secara rutin dan menjadi tolok ukur dalam melakukan program kerja.

Indra Bastian (2001:79), menyatakan bahwa anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Selain itu hal yang penting dan menguatkan konsep dalam pencapaian akuntabilitas, Indra Bastian (2001:81) mengemukakan tujuan anggaran adalah sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen dan instrument kebijakan ekonomi.

Anggaran bagi pemerintah maupun swasta merupakan pedoman bagi segala tindakan yang akan dilaksanakan dan didalam anggaran

disajikan rencana-rencana penerimaan, pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan rupiah dan disusun menurut klasifikasinya secara sistematis. Isi dari anggaran tersebut merupakan prediksi mengenai jumlah penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam tahun anggaran tertentu dan mengambarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh aparat pemerintah bersama rakyatnya. Hal serupa juga disampaikan oleh Mardiasmo (2009:61), bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa anggaran pada hakikatnya harus memenuhi kriteria yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut : Aspek perencanaan, Aspek Pengendalian dan juga Aspek akuntabilitas publik.

Penganggaran merupakan kegiatan secara terus menerus yang dimulai dengan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaan. Proses kegiatan dari awal sampai dengan akhir ini dikenal dengan siklus anggaran (*budget cycle*) seperti digambarkan pada siklus diatas. Dalam siklus ini tidak hanya berjalan dengan estafet, tetapi mengalami proses yang simultan, ketika anggaran masih dilaksanakan dan belum dibuat pelaporan, proses perencanaan dan penyusunan telah dimulai. Hal inilah yang menjadi kesulitan untuk memanfaatkan pelaporan dan hasil pemeriksaan untuk dipakai sebagai masukan dalam proses penyusunan anggaran selanjutnya.

4). Pembiayaan Pendidikan

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) mengandung ketentuan tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 dan Pasal 62 yaitu standar pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya “biaya operasi” satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup “biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal”. Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:

- a) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- b) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- c) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- d) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - (1). Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.

- (2). Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - (3). Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- e) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP
- PP tentang standar pembiayaan pendidikan ini sebelum dikeluarkan, telah ada SK Mendiknas tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) yaitu Kepmendiknas No.053/U/2001 yang menyatakan bahwa SPM bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Penyusunan SPM bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu kepada PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mengisyaratkan adanya hak dan kewenangan Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan tentang perencanaan nasional dan standarisasi nasional.

f. Efektivitas Program

1). Konsep Efektivitas

Inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi biasanya menjadi penilaian di dalam penyelenggaraan urusan sektor publik. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam

menjalankan aktifitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen kegiatan (Mardiasmo 2000:4) :

- a) Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dengan satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif
- b) Efisiensi : pekerjaan output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang ditetapkan
- c) Efektifitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektifitas, secara sederhana merupakan perbandingan outcome dan output.

Konsep efektifitas sering dijadikan indikator keberhasilan suatu organisasi, karena melalui efektifitas dapat diketahui seberapa jauh target yang telah ditetapkan suatu organisasi dapat dicapai.

Setiap organisasi mempunyai tujuan tertentu, tujuan organisasi swasta tentunya berbeda dengan tujuan organisasi pemerintah. Pola pengukuran efektifitas antara kedua organisasi tersebut sudah tentu akan berbeda. Pola efektifitas yang ditekankan dalam penelitian ini adalah pola pengukuran efektifitas pada organisasi publik atau

pemerintah dengan orientasi pencapaian tujuan melayani kepentingan masyarakat.

Pemahaman konsep efektifitas yang bertumpu pada pendekatan tujuan, sebagaimana dikatakan Benhard (dalam Gibson et all, 1972:27) diartikan sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukan tingkat efektifitas, dimana tujuan yang diinginkan dengan hasil yang dicapai sudah sesuai.

Pemahaman tentang efektifitas terdapat elemen penting efektifitas yaitu adanya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya yang digunakan sebagai kerangka acuan pengukuran pencapaian efektifitas suatu organisasi.

Drucker (dalam tober, 1986:17) menyebutkan bahwa efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang benar yang harus dilakukan, memusatkan sumber daya dan upaya padanya.

Maer (dalam Stoner, 1986:207) menyatakan bahwa, efektifitas merupakan suatu keputusan dinilai dari kualitas tujuan dan penerimaan atau sambutan dari mereka yang melaksanakannya. Pendapat di atas, mencerminkan bahwa dengan sumber daya yang selalu terbatas adanya, maka untuk mencapai efektifitas suatu kegiatan harus memenuhi prinsip efisiensi.

Efektifitas menurut The Liang Lie (1986:108), diartikan sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya,

maka orang itu dikatakan efektif, apabila menimbulkan akibat atau maksud sebagaimana dikendakinya.

Steers (1985:5) lebih lanjut menyatakan bahwa, efektifitas harus dinilai terhadap tujuan yang dapat dilaksanakan dan bukan terhadap konsep tujuan maksimum. Efektifitas dinilai menurut ukuran berapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak untuk dicapai.

Syamsi (1988:6) menyatakan bahwa konsep efektifitas berbeda dengan konsep efisiensi, dengan penjelasan sebagai berikut:

Effisiensi diterjemahkan dengan daya guna, sedangkan efektivitas diterjemahkan dengan hasil guna. Efektifitas (hasil guna) ditekankan pada efek atau hasil, tanpa memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna) penekanannya disamping hasil yang ingin dicapai, juga perlu dipertimbangkan pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut.

Efektifitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Hubungan antara efektifitas dan efisiensi sebagian ahli melihat antara keduanya terdapat hubungan timbal balik saling mempengaruhi, artinya konsep efisiensi satu dipandang sebagai bagian dari konsep efektifitas dan sebaliknya pada saat yang lain konsep efektifitas merupakan bagian dari konsep efisiensi, dan Gibson (1986:32) cenderung menilai aspek efisiensi merupakan bagian dari konsep efektifitas.

Bernard (dalam Prawirosentono ; 1999:27), lebih lanjut menyatakan bahwa: suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila telah tercapai tujuan yang telah ditentukan, dan dikatakan efisien bila dalam proses kegiatan itu memuaskan pelaksana yang merupakan pendorong untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Efektifitas merupakan suatu konsep yang penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan organisasi dalam pencapaian sasarnanya. Banyak organisasi dengan ukuran sangat besar dengan kegiatan yang sifatnya saling berbeda. Bagian-bagian ini mempunyai sasaran sendiri yang satu sama lain berbeda, sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengukuran efektifitas (Huseini, 1987:57)

Quinn dan Rorthbaugh (dalam Kasim 1989:17), mengklasifikasikan konstruk efektifitas organisasi dalam empat model yang disebut dengan pendekatan nilai yang bersaing (*a competing values approach atau CVA*) sebagai kerangka yang terintegrasi, untuk mempelajari efektivitas meliputi :

- a) Model Hubungan Manusia, diperlihatkan pada kwadran kiri atas, hal ini sesuai dengan penekanan pada fleksibilitas dan focus internal. Kwadran ini merupakan tempat dari kohesi dan moril (sebagai cara) dan pengembangan sumber daya manusia (sebagai tujuan)
- b) Model Sistem Terbuka, terletak pada kwadran sebelah kanan atas, model ini menekankan pada fleksibilitas dan fokus eksternal, kwadran ini merupakan tempat kriteria fleksibilitas dan kesiapan

(sebagai cara) serta pertumbuhan, perolehan sumber (sebagai tujuan)

- c) Model Tujuan Rasional, terletak pada kwadran kanan bawah sebab model ini menekankan pada focus eksternal dan pengawasan, kriteria perencanaan, penetapan tujuan (sebagai cara) dan produktivitas efisiensi (sebagai tujuan)
- d) Model Proses Internal, terletak pada kwadran kiri bawah sebab model ini menekankan pada pengawasan dan fokus internal, kwadran ini merupakan lokasi dari kriteria dari manajemen informasi dan komunikasi (sebagai cara) dan kriteria stabilitas dan pengawasan (sebagai tujuan)

Pendekatan dalam pengukuran efektifitas dapat dilihat dari pendapat Huseini dan Lubis (1987:55-64) yaitu meliputi :

- a) Pendekatan sasaran (*goal approach*) dalam pendekatan ini pengukuran efektifitas memusatkan perhatian pada aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan.
- b) Pendekatan sumber (*system resource approach*), mengukur efektifitas dari sisi input, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performansi yang baik.
- c) Pendekatan proses (*proses approach*), melihat kegiatan internal organisasi, dan mengukur efektifitas melalui berbagai indikator internal seperti : efisiensi ataupun iklim organisasi

d) Pendekatan gabungan (*integratif approach*), menggunakan ketiga pendekatan tersebut secara bersamaan.

Keempat model pendekatan efektifitas tersebut yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan tujuan rasional atau pendekatan sasaran/tujuan, di mana pendekatan ini mencoba mengukur sejauhmana organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian pengukuran ini akan memberikan hasil yang lebih realistik dari pada model pengukuran lainnya.

Steers (1985:2006) di dalam kaitannya dengan efektifitas, yang mengemukakan pengukuran efektifitas ini akan memberikan hasil yang lebih realistik dari pada model pengukuran lainnya, mengemukakan efektifitas terdiri dari lima dimensi konsep efektifitas antara lain meliputi:

- a) Kemampuan menyesuaikan diri atau keluwesan
- b) Produktivitas
- c) Kepuasan kerja
- d) Kemampuan berlaba, dan
- e) Pencarian sumber daya

Gibson dkk (1997:32) mengemukakan dimensi efektifitas dikaitkan dengan periodisasi waktu sebagaimana tergambar di bawah ini :

Gambar 2.2

Waktu	Jangka Pendek	Menengah	Panjang
Kriteria	Produktivitas Efektifitas Kepuasan	Menyesuaikan diri Perkembangan	Hidup terus

Johnson dan Levin, (1991:210 dalam Joko Widodo) pun menjelaskan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang mengorganisir kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang menekankan pada analisis biaya program (*program cost*) dikaitkan dengan hasil (*program effects*).

2). Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektifitas suatu kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan atau disetujui sebelumnya. Hal tersebut jika belum tersedia maka auditor bekerjasama dengan top managemen dan badan pembuat keputusan untuk menghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program yaitu :

- a) Proksi untuk mengukur dampak atau pengaruh
- b) Evaluasi oleh konsumen
- c) Evaluasi yang menitikberatkan pada proses bukan pada hasil

Pengukuran efektifitas yang menjadi terpenting itu terletak pada berhasil tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya, apabila organisasi berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut

dikatakan telah berjalan dengan efektif. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lipat lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang dianggarkan. Efektifitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002 : 134)

3). Program Pendidikan

a). Wajib Belajar Sembilan Tahun

Wajib Belajar Sembilan Tahun adalah program belajar yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka menuntaskan kebodohan dan kemiskinan warga negara dengan tingkat pendidikan yang diisyaratkan mulai dari SD sampai dengan SMP. Dengan menyadari akan betapa besar dan penting peran pendidikan dalam peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan pencanangan dan pemberlakuan Program Wajib Belajar bagi setiap warga negara. Dimulai pada tahap awal Pemerintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar Enam Tahun yang pada dasarnya merupakan prasyarat umum bahwa setiap anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) harus dapat membaca, menulis, dan berhitung.

Program ini merupakan kelanjutan Program Wajib Belajar Enam yang dicanangkan Pemerintah pada PELITA III, dan program tersebut telah memberikan dampak positif dan hasil yang menggembirakan, terutama pada percepatan pemenuhan kualitas

dasar manusia Indonesia. Hal yang dapat dirasakan salah satunya adalah bahwa Program Wajib Belajar Enam Tahun tersebut telah mampu mengantarkan Angka Partisipasi (Murni) Sekolah. Usaha dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia pemerintah melaksanakan *education for all*. Pemerintah, melalui PP No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Orientasi dan prioritas kebijakan tersebut, antara lain:

- (1) penuntasan anak usia 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar (SD),
- (2) penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk SLTP, dan
- (3) pendidikan untuk semua (*educational for all*).

Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diharapkan mampu mengantarkan manusia Indonesia pada pemilikan kompetensi Pendidikan Dasar, sebagai kompetensi minimal. Kompetensi Pendidikan Dasar yang dimaksudkan, mengacu pada kompetensi yang termuat dalam Pasal 13 UU No. 2 tahun 1989 yaitu kemampuan atau pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (pendidikan menengah).

Hal ini juga relevan dengan unsur-unsur kompetensi pendidikan dasar yang harus dikuasai lulusan seperti yang

diidentifikasi oleh *The International Development Research Center*, meliputi:

- (1). kemampuan berkomunikasi;
- (2). kemampuan dasar berhitung;
- (3). pengetahuan dasar tentang negara, budaya, dan sejarah;
- (4). pengetahuan dan keterampilan dasar dalam bidang kesehatan, gizi, mengurus rumah tangga, dan memperbaiki kondisi kerja; dan
- (5). kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bersikap dan berpikir kritis, serta dapat memanfaatkan perpustakaan, buku-buku bacaan, dan siaran radio.

Program wajib belajar sembilan tahun yang didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*), yang juga sejalan dengan Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak.

Wajib belajar sembilan tahun juga bertujuan merangsang aspirasi pendidikan orang tua dan anak yang pada gilirannva diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Untuk itu, target penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun bukan semata-mata untuk mencapai target angka partisipasi sesuai dengan target yang ditentukan namun perhatian

yang sama ditujukan juga untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar dan pelaksanaan pendidikan yang efektif.

b). Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun

Program wajib belajar juga, selain menuntaskan kebodohan mampu mengurangi angka kemiskinan. Bangsa Indonesia, melalui pendidik ini pula, mampu mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Pendidikan adalah kekuatan”, maka Bangsa Indonesia akan segera terbebas dari kebodohan dan kemiskinan serta menjadi bangsa yang unggul pada kompetisi global. Sisi pelaksanaan wajib belajar baik enam tahun maupun sembilan tahun secara umum bertujuan untuk:

- (1). Memberikan kesempatan setiap warga negara tingkat minimal SD dan SMP atau yang sederajat,
- (2). Setiap warga negara dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki,
- (3). Setiap warga negara mampu berperan serta dalani kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan
- (4). Memberikan jalan kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Beberapa pendekatan terdapat dalam melaksanakan wajib belajar sembilan tahun yang dilakukan sebagai strategi pelaksanaannya.

c). Pendekatan Pelaksanaan Program

Pendekatan yang diterapkan dalam mengimplementasikan wajib belajar sembilan tahun adalah sebagai berikut :

(1). Pendekatan Budaya

Sosialisasi wajib belajar dilakukan dengan memanfaatkan budaya yang berkembang di daerah tersebut; misalnya daerah yang masyarakatnya senang dengan seni, maka pesan-pesan wajib belajar dapat disisipkan pada gelar seni. Masyarakat yang sangat menghormati adat, maka tokoh adat dilibatkan dalam pemikiran dan pelaksanaan sosialisasi Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu. Sanksi adat biasanya lebih disegani daripada sanksi hukum.

(2). Pendekatan Sosial

Sosialisasi Wajar Dikdas Sembilan Tahun yang bermutu perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bila dalam masyarakat ada tokoh yang disegani dan bisa menjadi panutan, maka tokoh ini perlu dilibatkan dalam sosialisasi. Tokoh masyarakat ini bisa berasal dari tokoh formal, maupun tokoh non formal. Sosialisasi pada masyarakat ekonomi lemah, dilakukan dengan memberikan informasi tentang pelayanan pemerintah untuk pendidikan, misalnya BOS ataupun beasiswa.

Anak bila sibuk membantu kerja orangtua, maka anak tidak harus berhenti bekerja, tetapi disampaikan jenis pendidikan alternatif

yang dapat diikuti oleh anak yang bersangkutan, misalnya SMP Terbuka atau program Paket B.

(3). Pendekatan Agama

Masyarakat yang sangat agamis dan sangat mentaati ayat-ayat suci terdapat pada daerah tertentu. Peran para tokoh agama untuk daerah seperti ini adalah, sangat sesuai. Dengan mengutip ayat-ayat suci, maka Konsep wajib belajar dengan mengutip ayat-ayat suci, akan lebih mudah diikuti. Motto “belajar adalah ibadah” yang didasarkan atas kajian yang sangat mendalam oleh para tokoh agama dapat diangkat menjadi motto dalam sosialisasi Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu.

(4). Pendekatan Birokrasi

Pendekatan birokrasi ialah upaya memanfaatkan sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembentukan tim koordinasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan merupakan salah satu bentuk pendekatan birokrasi. Birokrasi ditempuh karena dengan pendekatan ini lebih mudah diperoleh berbagai faktor penunjang baik tenaga, sarana, maupun dana. Pendekatan ini akan lebih berhasil bila digabung dengan pendekatan yang lain.

(5). Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum ialah pendekatan yang hanya digunakan untuk daerah yang masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap pendidikan sangat rendah dan tingkat resistensinya tinggi. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun sampai saat ini masih

memberlakukan konsep “*universal basic education*” dan belum menerapkan konsep “*compulsary education*”. Artinya, program wajib belajar baru sebatas himbauan tanpa diikuti sanksi hukum. Namun jika diperlukan, UU Nomor 20 tahun 2003, memberi kemungkinan kepada pemerintah untuk menerapkan konsep “*compulsary education*”, sehingga berkonsekuensi adanya sanksi hukum bagi yang tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya terhadap program wajib belajar, baik pemerintah, pemerintah daerah, orangtua, maupun peserta didik.

Pemerintah untuk mempercepat akselerasi penuntasan wajib belajar, pada tahun 2006 menerbitkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang *Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara*. Inpres ini menginstruksikan kepada para Menteri terkait, Kepala BPS, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memberikan dukungan dan mensukseskan program pemerintah yang dimaksud.

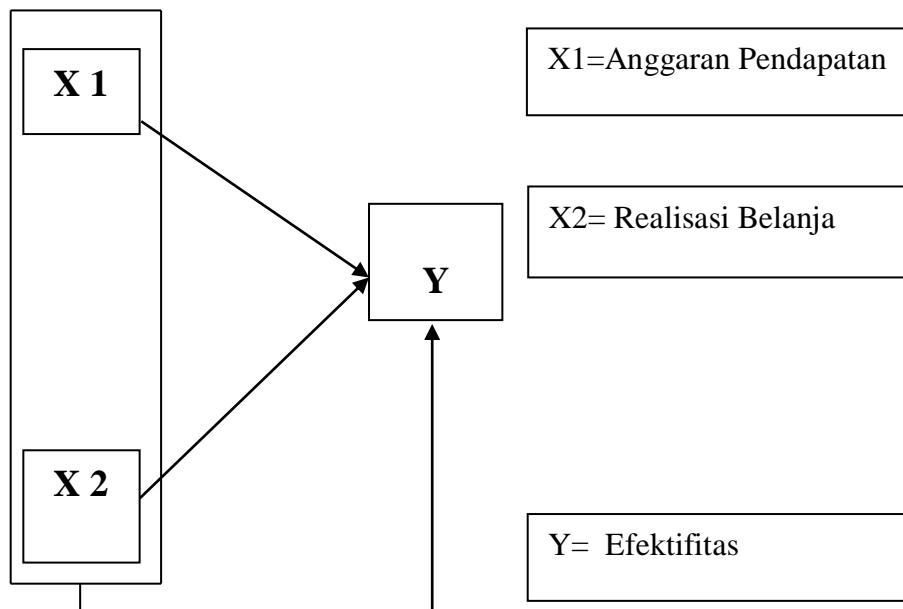
2. Pengembangan Hipotesis

a. Kerangka Pemikiran

Konsep dan teori yang diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat dipakai untuk membangun kerangka pemikiran yang akan digunakan sebagai paradigma penelitian yang bertujuan, untuk melihat sejauh mana pengaruh anggaran pendapatan dan Ralisasi Belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial terhadap efektifitas program. Keseluruhan teori yang membahas

mengenai pengaruh Anggaran pendapatan dan belanja terhadap efektifitas program pendidikan dasar, maka kerangka pemikiran yang digambarkan pada gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.3
KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS



Keterangan :

1. Pengaruh Anggaran Pendapatan terhadap Efektifitas Program

Anggaran pendapatan merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi efektifitas program, jika anggaran pendapatan adalah makin besar, maka efektifitas program yang dihasilkan akan semakin besar pula.

2. Pengaruh Realisasi Belanja terhadap Efektifitas Program.

Realisasi belanja merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi efektifitas program, semakin besar realisasi belanja maka akan semakin positif pula efektifitas program.

3. Pengaruh Anggaran Pendapatan, dan Realisasi Belanja terhadap Efektifitas Program.

Anggaran pendapatan dan realisasi belanja, secara bersama-sama mempengaruhi efektifitas program. Semakin besar Anggaran pendapatan dan realisasi belanja maka semakin positif pula Efektifitas Program.

b. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai latar belakang dalam bab I, telah mengemukakan bahwa terdapat beberapa penelitian yang telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi dan memiliki pengaruh dari anggaran terhadap efektifitas, Hal tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah berikut ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL
1.	Granita Quartiana (2003)	Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah dana yang dikeluarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap pencapaian kinerja Pendidikan walaupun belum efektif
2.	Novia Andriana (2011)	Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Terhadap Realisasi Tata	Diketahui bahwa anggaran pendidikan yang dikelola dengan

		Kelola Anggaran Pembangunan Sektor Pendidikan dengan menggunakan Analisis BSC	penyerapan anggaran 100% dengan kata lain sudah konsisten dengan realisasi pembangunan, menghasilkan kinerja yang baik dan positif. Selain itu dibutuhkan partisipasi masyarakat yang baik.
3.	Nina Toyamah dan Syaikhu Usman (2004)	Pengaruh Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya Terhadap Pengelolaan Pendidikan Dasar	Pengelolaan anggaran pendidikan dipengaruhi oleh transparansi konsistensi pemerintah dalam mengelola keuangan Juga partisipasi masyarakat yang dibutuhkan
4.	Kurnawiah Nurcahyani (2010)	Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Melalui Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi sebagai Variabel Intervening	Anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan komitmen organisasi, namun anggaran tidak berpengaruh langsung sebagai variabel intervening terhadap persepsi inovasi
5.	Siti Musyarofah (2006)	Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Eksekutif Publik dan Moral Hazzard	Terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi anggaran dan Moral Hazzard terhadap kinerja eksekutif publik

6.	Robinson (2006)	Pengaruh Kualitas Anggaran terhadap Efektivitas Pengawasan Pengetahuan sebagai Variabel Moderating	Secara bersama-sama, kejelasan anggaran, evaluasi anggaran, dan keakuratan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengawasan anggaran
7.	Lingga Purnamasari (2006)	Pengaruh Karakteristik Anggaran terhadap Efektifitas Pelaksanaan Anggaran	Partisipasi, kesulitan, evaluasi, umpan balik anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan anggaran.

Sumber : Jurnal Akuntansi

Efektifitas kinerja dalam penyelenggaraan program pendidikan dasar berdasarkan penelitian terdahulu dapat dipengaruhi salah satu di faktor diantaranya oleh anggaran.

c. Hipotesis

Berdasar pada kajian teori yang dilakukan oleh peneliti, Mardiasmo mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat untuk memotivasi manajer dan staf dalam secara ekonomis, efisien dan efektif rangka mencapai tujuan. Dan merupakan instrument pencapaian akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh uang publik.

Kajian empirik yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian terdahulu yang membahas mengenai variabel anggaran pendapatan oleh Granita Quartiana dan Kurnawiyah Nurcahyani, menyatakan bahwa anggaran pendapatan berpengaruh signifikan untuk menghasilkan kinerja publik yang baik dan positif.

Penelitian terdahulu lain yang dilakukan peneliti pada variabel realisasi belanja oleh Granita Quartiana dan Novia Andriana, Nina Toyamah dan Syaikhu Usman menyatakan bahwa selain anggaran pendapatan, jika realisasi belanja dilaksanakan konsisten sesuai dengan anggaran, maka akan didapat pengaruh terhadap kinerja organisasi yang baik dan positif.

Siti Musyarofah, Robinson dan Lingga Purnamasari meneliti variabel efektifitas mengemukakan bahwa efektifitas tehadap kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas tersebut adalah anggaran.

Dengan demikian hipotesis alternatif dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ha 1 : Anggaran pendapatan dan realisasi belanja berpengaruh terhadap Efektifitas Program secara simultan

Ha 2 : Anggaran pendapatan berpengaruh terhadap Efektifitas Program secara parsial

Ha 3 : Realisasi Belanja berpengaruh terhadap Efektifitas Program secara parsial.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Model dan Desain Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang kinerja pertanggungjawaban penggunaan Anggaran pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun berupa Dana Dekonsentrasi dalam rangka pelimpahan fungsi dan tugas pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada APBN yang disajikan didalam LKPP menurut fungsi, sub fungsi dan program secara periodik pada tahun 2006-2010 yang dipublikasi Kementerian Keuangan dan Lakip Kemendiknas dalam menyelenggarakan pendidikan dasar.

Dalam penelitian ini membahas pengaruh anggaran dan belanja sebagai variabel-variabel bebas yang mempengaruhi efektifitas pada program pendidikan dasar sembilan tahun. Penelitian ini bertujuan menguji teori-teori yang menyatakan bahwa anggaran dan realisasi belanja secara toritik dapat mempengaruhi efektifitas, melalui pengukuran angka pada laporan keuangan negara sebagai instrument penelitian dengan melakukan analisis data dengan memakai prosedur statistik dengan menggunakan SPSS versi 19. Disamping data skunder berupa laporan keuangan, peneliti juga melakukan wawancara terhadap sejumlah responden sebagai data penunjang.

Objek penelitian difokuskan pada Pemerintah Pusat di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI yaitu pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar selaku penyelenggara program, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian dengan menggunakan data

skunder, menguji teori yang menyatakan bahwa Efektifitas dipengaruhi oleh faktor Anggaran Pendapatan(X1), dan Realisasi Belanja (X2) sebagai variabel bebas, dan variabel terikatnya adalah Efektifitas Organisasi (Y).

Selain data skunder peneliti juga melakukan observasi dan wawancara sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data dan informasi untuk lebih mengetahui keadaan yang sebenarnya bagaimana dalam pengelolaan program pendidikan dasar di Indonesia. Hasil pengujian data digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari teoritis. Penelitian ini akan melakukan indentifikasi bagaimana variabel Independen (Bebas) mempengaruhi variabel Dependen (Terikat).

2. Definisi Operasional Variabel

Varaibel bebas (independent variabel) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Anggaran Pendapatan (X1) dan Realisasi Belanja (X2) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial dan Efektifitas Program (Y). Untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel-variabel, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Efektifitas Program merupakan suatu hasil yang dicapai seseorang atau kelompok orang dalam satu organisasi, sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam suatu program.
- b. Anggaran Pendapatan merupakan semua rencana penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

c. Realisasi Belanja merupakan semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya dari pemerintah.

Untuk mengukur variabel-variabel yang sudah diidentifikasi tersebut digunakan instrument dan pengukuran pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Table 3.1
Operasional Variabel

Jenis Variabel	Variabel	Indikator	Pengukuran	Skala Pengukuran	Sumber Pustaka
Dependen	Efektifitas Program (Y)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	APK, Periode 2006-2010	Rasio	Mardiasmo (2002)
Independen	Anggaran Pendapatan (X1)	Pendapatan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Pemerintah Pusat dan Daerah	Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2006-2010	Rasio	PP 71 Tahun 2010 Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar (2009)
Independen	Realisasi Belanja (X2)	Realisasi Belanja Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Pemerintah Pusat dan Daerah	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2006-2010	Rasio	PP 71 Tahun 2010 dan Deddi Nordinawan, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah (2007)

Sumber : Data diolah

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data kuantitatif yang berbentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia pada tahun 2006-2010 yang diperoleh pada LKPP menurut fungsi, sub fungsi dan program yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan RI, data mengenai pencapaian kinerja program wajib belajar sembilan tahun diperoleh pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan BPS Pusat.

Dari laporan LKPP diperoleh mengenai data APBN jumlah anggaran pendapatan dan belanja bagi program dan penyerapan atas anggaran tersebut, sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diperoleh data mengenai program wajib belajar sembilan tahun dan dari BPS Pusat diperoleh mengenai jumlah angka partisipasi kasar yang merupakan indikator sebagai parameter keberhasilan program. Semua data yang diambil oleh peneliti merupakan data yang dipublikasi dari tahun 2006-2010.

4. Populasi dan Sampel

Menurut pendapat Sugiyono (2010:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikumukakan oleh Sekaran (2006:121), yang mengatakan bahwa populasi (*population*) adalah sekelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

sedangkan sampel yang akan diambil adalah provinsi yang ada di negara Indonesia yang memenuhi kriteria dari 33 provinsi yaitu terdiri sebanyak 12 Provinsi, sebagai wilayah yang mendapat alokasi dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat, yang merupakan pelimpahan pelaksanaan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk kegiatan program wajib belajar sembilan tahun.

Penentuan sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian (Nugroho, 2005:40). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yang berarti bahwa populasi yang memenuhi kriteria tertentu saja yang diambil. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah provinsi yang ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Provinsi dengan laju pertumbuhan anak usia sekolah sembilan tahun rata-rata normal selama tahun 2006-2010
- b. Provinsi dengan kategori pertumbuhan ekonomi menengah
- c. Provinsi APK pendidikan sembilan tahun stabil selama tahun 2006-2010
- d. Bukan provinsi yang berada di pulau Jawa dan bukan merupakan provinsi yang tertinggal

**Tabel 3.2
Daerah Sampel Penelitian**

No	Nama Provinsi	kriteria 1	kriteria 2	kriteria 3	kriteria 4
1	NAD	v	v	v	v
2	Sumatera Utara	v	-	-	v
3	Sumatera Barat	v	v	v	v
4	Riau	v	v	v	v
5	Kepuluan Riau	v	-	-	v
6	Jambi	v	v	v	v
7	Sumatera Selatan	v	-	-	v

8	Bangka Belitung	v	v	v	v
9	Bengkulu	v	v	-	v
10	Lampung	v	-	-	v
11	DKI Jakarta	v	-	-	-
12	Jawa Barat	v	-	-	-
13	Banten	v	-	-	-
14	Jawa Tengah	v	-	-	-
15	D.I Yogyakarta	v	-	-	-
16	Jawa Timur	v	-	-	-
17	Bali	v	v	v	v
18	NTB	v	v	v	v
19	NTT	v	v	-	-
20	Kalimantan Barat	-	v	-	v
21	Kalimantan Tengah	v	v	v	v
22	Kalimantan Selatan	v	v	v	v
23	Kalimantan Timur	-	v	-	v
24	Sulawesi Utara	-	v	-	v
25	Gorontalo	v	v	v	v
26	Sulawesi Tengah	v	v	v	v
27	Sulawesi Selatan	v	-	-	v
28	Sulawesi Barat	v	v	v	v
29	Sulawesi Tenggara	-	v	-	v
30	Maluku	v	-	-	-
31	Maluku Utara	v	-	-	-
32	Papua	v	-	-	-
33	Papua barat	-	-	-	-

Sumber data BPS RI

Sumber : data diolah

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis mempergunakan data kuantitatif berupa data skunder dengan teknik dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan informasi dengan memanfaatkan dokumen dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen berbentuk angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat periode tahun 2006-2010 yang telah diaudit oleh BPK dan dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia oleh Dirjen Perbendaharaan dalam situs: www.perbendaharaan.go.id, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI selain itu data

mengenai efektifitas angka pendidikan yang di akses melalui data BPS Pusat, www. Bps.go.id. dan data lain yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan juga sejumlah data skunder lain yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2002:147).

6. Metode Analisa Data

Pada penelitian ini digunakan metode analisa data regresi berganda, yang merupakan penelitian dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial yang digunakan untuk menganalisa data lebih dari satu variabel penelitian.

Sehingga asumsi-asumsi yang dapat digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Uji Statistik Deskriptif

Menurut C. Trihendradi : 2011, mengemukakan pada pengukuran statististik deskriptif pada dasarnya memaparkan secara numerik dua hal pokok pengukuran data, yaitu pemasatan data (central tendency) dan penyimpangan data (dispersi), Central Tendency mengukur pemasatan suatu data dengan beberapa parameter umum yaitu:

- 1) Mean atau rata-rata, yaitu nilai rata-rata hitung
- 2) Median, yaitu nilai tengah data setelah data tersebut diurutkan dari kecil ke besar
- 3) Modus, yaitu nilai yang sering muncul dari suatu data

Sedangkan Dispersi mengukur penyebaran suatu data, beberapa parameter yang digunakan untuk pengukuran dispersi suatu data, yaitu:

- 1) Standar Deviasi, yaitu simpangan baku

- 2) Variance, adalah nilai varian atau nilai kuadrat dari standar deviasi
- 3) S.E. Mean.adalah nilai kesalahan standar dari sampel

b. Uji Asumsi Klasik OLS (Ordinary Least Square)

Dalam penggunaan teknik estimasi variabel independen yang melandasi analisis regresi disebut juga dengan *Ordinary Least Square* (pangkat terkecil kuadrat). Metode OLS ini adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis lurus (Ghazali, 2006:82). Didalam pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi harus memenuhi kriteria dengan terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi klasik, dalam pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1). Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data yang digunakan dalam variabel penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005;18). Untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak, maka dapat dilihat melalui *normal probability plot* dengan membandingkan distribusi komulatif dan distribusi normal. Data data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Apabila Distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghazali, 2006;110)

2). Uji Multikolinieritas

Pada pengujian *Multikolinieritas* bertujuan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lainnya dalam satu model (Nugroho, 2005;58). Uji multikolinieritas juga memiliki fungsi untuk mendeteksi terjadinya multikolinieritas yang bertujuan untuk menghindari pembiasan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yaitu pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0.1, maka model tersebut terbebas dari multikolinieritas. $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF > 10$ maka $Tolerance = 0.1$ (Ghazali, 2006;92).

3). Uji Heterosekadastisitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi terjadi kesamaan variance dai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghazali, 2006;105). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan variance residual dalam suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain, atau heteroskedastisitas. Dalam menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat pada pola gambar scatter plot model tersebut dengan melakukan Uji Glesjer (Ghazali, 2006 ;105).

4). Uji Autokorelasi

Pada pengujian autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah regresi linier ada korelasi kesalahan penganggu pada periode t dan dengan kesalahan penganggu pada periode sebelumnya t-1 (periode sebelumnya) (Ghazali, 2006:95). Apabila terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian autokorelasi ini dengan menggunakan uji Durbin Watson (*Durbin Watson Test*) yaitu untuk menguji apakah ada autokorelasi serial atau tidak dengan cara menghitung nilai *d* statistik. Pengujian menggunakan asumsi apabila nilai Durbin Watson berada diantara -2 sampai dengan +2 berarti tidak terdapat autokorelasi.

c. Uji Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan nilai Y (variabel terikat) apabila nilai X (variabel bebas) berubah satu satuan unit tertentu, menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Ghozali. 2006:7). Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan

Y = Efektifitas

α = Konstanta

X_1 = Anggaran Pendapatan

X_2 = Realisasi Belanja

e = Error

d. Uji Hipotesis (Uji F dan t)

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi (α) 0.05 atau 5%. Dalam pengambilan keputusan untuk diterima atau ditolak maka dilakukan pengujian terhadap variabel-variabel penelitian dengan cara menguji secara simultan melalui signifikansi simultan (uji statistik F). maksud dari pengujian ini untuk dapat menjelaskan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2006:84). Untuk itu hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta_k \neq 0$$

artinya apakah semua variabel independen secara simultan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan menentukan taraf signifikansi ($\alpha=5\%$), maka nilai F hitung dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Keterangan :

F = Nilai Kemaknaan seluruh variabel

R^2 = Koefisien Determinasi

k = Banyaknya variabel independen

n = Jumlah Sampel

Nilai F tabel diperoleh dengan menggunakan tingkat signifikansi α dan derajat kebebasan (df) tertentu. Dengan membandingkan antara nilai F hitung dan F tabel, jika dalam perhitungan F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Sedang pada pengujian masing-masing variabel secara parsial, dilakukan uji signifikansi parameter individual (uji t statistik) yang memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variasi variabel dependen, dalam hipotesis statistik dapat dilihat sebagai berikut :

$$\begin{aligned} H_0 &: \beta_i = 0 \\ H_a &: \beta_i \neq 0 \end{aligned}$$

Artinya apakah suatu variabel independen merupakan atau bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan taraf signifikansi ($\alpha=5\%$), maka t hitung dapat diketahui dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\hat{\alpha}_1}{T \text{ hitung} = \frac{\hat{\alpha}_1}{S.e.\hat{\alpha}_1}}$$

Keterangan :

$\hat{\alpha}$ = Koefisien regresi variabel ke 1

S.e = Standar error

Dengan membandingkan antara nilai t hitung maka dapat ditentukan kriteria pengujian sebagai berikut :

Apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima H_a ditolak.

Apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak H_a diterima .

e. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006:83). Pengujian koefisien determinasi dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi majemuk (*multiple coefficient of determination*) yaitu prioritas variabel terikat yang dapat

dijelaskan oleh variabel bebas secara bersama-sama

ESS = Explained Sum Of Squares atau jumlah kuadrat yang dijelaskan atau variasi nilai variabel terikat yang ditaksir

sekitar rata-rata

Tss = Total Sum of Square atau total variasi variabel terikat sebenarnya rata-rata

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran data penelitian

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Sebagaimana yang terlampir dan diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa pada populasi yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah sebanyak delapan provinsi di Indonesia selama Tahun 2006-2010.

Hasil pengolahan data (terlampir). dimana hasil uji regresi berganda yang menunjukkan model regresi tidak melewati uji asumsi klasik yaitu tidak adanya autokorelasi serta terdapat model yang normal. Data tersebut dapat dijelaskan pada tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1
Hasil Uji Deskripsi Data Penelitian**

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	60	65.00	97.00	80.2000	7.28779
X1	60	.51	2.58	1.4655	.68776
X2	60	116.00	858.00	379.7500	212.44737
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data diolah

Berdasarkan pada pengolahan data dengan menggunakan SPSS Ver. 19 diatas yaitu analisis deskriptif memiliki karakteristik sebagai berikut: (N) menunjukkan jumlah data sebesar 60, maka karakteristik masing-masing variabel dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengaruh Anggaran Pendapatan (X1), dari 60 data nilai variabel Pengaruh Anggaran Pendapatan (X1) terkecil (minimum) adalah 0.51, sementara terbesar (maksimum) adalah 2.58. Nilai rata-rata (mean) adalah sebesar 1.465 dan standar deviasi 0.687.
- b. Pengaruh Realisasi Belanja (X2), dari 60 data nilai variabel Pengaruh Realisasi Belanja (X2) terkecil (minimum) adalah 116, sementara terbesar (maksimum) adalah 858. Nilai rata-rata (mean) adalah sebesar 379.75 dan standar deviasi 212.447
- c. Efektifitas Program (Y), dari 60 data nilai variabel Efektifitas (Y) terkecil (minimum) adalah 65, sementara terbesar (maksimum) adalah 97. Nilai rata-rata (mean) adalah sebesar 80.20 dan standar deviasi 7.287

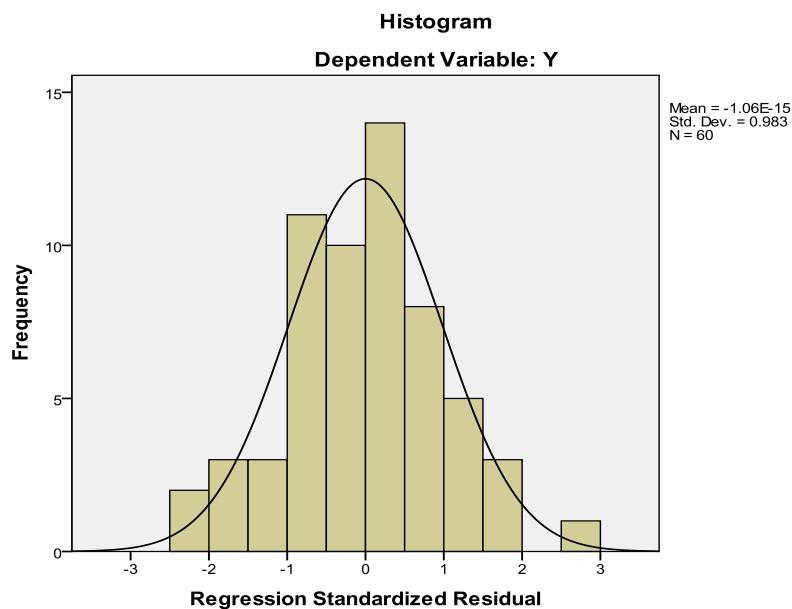
2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis data untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis statistik parametrik, yaitu analisis korelasi dan regresi sederhana berganda. Pengujian persyaratan analisis uji asumsi klasik antara lain :

a. Hasil Uji Normalitas

Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Grafik histogram dibawah ini menunjukan apakah residual terdistribusi normal atau tidak.

Gambar 4.1
Grafik Histogram Hasil Uji Normalitas



Sumber: data olahan

Dari grafik Histogram diatas dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusasi secara normal dengan ditandai penyebaran bentuk tidak menjauh dari garis regresi. Dengan uji normalitas statistik dapat dilihat dari Uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Y	X1	X2
N		60	60	60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	80.2000	1.4655	379.7500
	Std. Deviation	7.28779	.68776	212.44737
Most Extreme Differences	Absolute	.099	.132	.155
	Positive	.055	.132	.155
	Negative	-.099	-.115	-.107
Kolmogorov-Smirnov Z		.767	1.024	1.203
Asymp. Sig. (2-tailed)		.599	.246	.111

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data diolah

Uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilakukan untuk menguji apakah residual terdistribusi normal. Nilai Kolmogorov-Smirnov masing-masing sebesar :

- 1) Variabel Y = 0.599 > p-value 0.05, sehingga berdistribusi normal
- 2) Variabel X1 = 0.246 > p-value 0.05, sehingga berdistribusi normal
- 3) Variabel X2 = 0.111 > p-value 0.05, sehingga berdistribusi normal

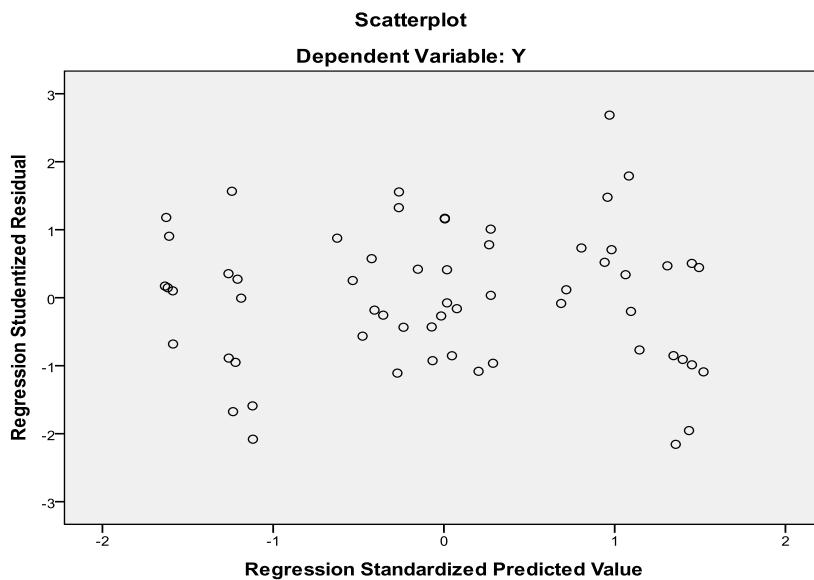
Semua nilai Kolmogorov-Smirnov dari masing-masing variabel > dari 0.05 itu menunjukan bahwa residual terdistribusi secara normal atau dengan kata lain residual berdistribusi normal.

b). Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika terjadi perbedaan disebut dengan Heteroskedastisitas. Model yang dikatakan baik adalah yang Homoskedastisitas. Sebagai dasar analisis sebagai berikut :

- 1) Jika terdapat pola tertentu yaitu titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit). Dari analisis tersebut dapat dikatakan terindikasi telah terjadi Heteroskedastisitas.
- 2) Apabila tidak terdapat pola yang jelas, dengan kata lain titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka disimpulkan tidak terjadi Heteroskedastisitas. Berikut gambar 4.2 hasil uji Heteroskedastisitas:

**Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Data diolah

Dari grafik *Scater plots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Dari gambar tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi dinyatakan layak untuk digunakan.

c. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Salah satu caranya untuk mendeteksinya ada atau tidak multikolinieritas didalam regresi adalah dengan melihat tolerance dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila kita hitung nilai tolerance < 0.10 dan nilai VIF > 10 , maka telah terjadi multikolinieritas yang cukup serius.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	.902	1.109
X2	.902	1.109

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah

Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukan tidak ada variabel independen yang memiliki tolerance kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%.

Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Hal ini dapat dilihat dari perincian sebagai berikut :

- 1) VIF X1 sebesar $1.109 < 10$ dengan nilai tolerance $0.902 > 0.10$ maka menunjukan data pengaruh Anggaran Pendapatan tidak mengalami multikolinier.
- 2) VIF X2 sebesar $1.109 < 10$ dengan nilai tolerance $0.902 > 0.10$ maka menunjukan data pengaruh Realisasi Belanja tidak mengalami multikolinier.

d. Hasil Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam pengujian autokorelasi yaitu dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test), pengambilan keputusan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan tabel 4.4 dibawah ini:

**Tabel 4.4
Pengambilan Keputusan Autokorelasi**

No	Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
1.	Tidak ada Autokorelasi Positif	1. Tolak	1. $0 < d < d_l$
2.	Tidak ada Autokorelasi Positif	2. No Decision	2. $d_l \leq d \leq d_u$
3.	Tidak ada Korelasi Negatif	3. Tolak	3. $4-d_l < d < 4$
4.	Tidak ada Korelasi Negatif	4. No Decision	4. $4-d_u \leq d \leq 4-d_l$
5.	Tidak ada Autokorelasi, Positif atau Negatif	5. Tidak Ditolak	5. $d_u < d < 4-d_u$

Sumber : Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS Cetakan IV. Badan Penerbit Univ. Diponegoro. Semarang 2006

Maka diperoleh hasil pengujian Autokorelasi seperti pada tabel 4.5. sebagai berikut :

**Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary ^b		
Model	R	Durbin-Watson
1	.829 ^a	1.730

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah

Berdasarkan output diatas, besarnya nilai Durbin-Watson (DW) adalah 1.730, nilai (du) dengan signifikansi 5%, jumlah sampel (n)=60 dan jumlah variabel independen 2 (k=2) adalah 1.479. Oleh karena itu Durbin Watson (DW) sebesar 1.730 lebih besar dari batas (du) yaitu 1.479 dan lebih rendah dengan angka $4-1.479 = 2.521$ (4-du), maka dapat disimpulkan dengan angka $1.479 < 1.730 < 2.521$ apabila dilihat dari angka Durbin Watson (DW) sebesar 1.960 berada diantara du (1.730) dan 4-du (2.521) atau dengan kata lain, bahwa tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif, sehingga dapat disimpulkan variabel tidak terdapat autokorelasi.

3. Hasil Uji Regresi

Pada pengujian regresi dapat dilihat hasil pengolahan data SPSS versi 19 yang menghasilkan output pada tabel 4.6 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Berganda**

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	68.409	1.420
X1	9.095	.827
X2	.055	.015

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 68.409 + 9.095X1 + 0.055X2 + e$$

Keterangan :

X1 = Pengaruh Anggaran Pendapatan

X2 = Pengaruh Realisasi Belanja

Y = Efektifitas Program

e = Error

Dari hasil penelitian diperoleh persamaan regresi dan dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 68.409 artinya apabila pengaruh Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja, maka dapat dikatakan terjadi kenaikan efektifitas mengalami kenaikan sebesar 68.409
- b. Koefisien regresi Pengaruh Anggaran Pendapatan sebesar 9.095. artinya apabila pengaruh anggaran pendapatan meningkat 1 satuan, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan sebesar efektifitas 9.095 satuan.
- c. Koefisien regresi Pengaruh Realisasi Belanja sebesar 0.055 artinya apabila pengaruh Realisasi Belanja meningkat 1 satuan, maka akan berpengaruh terhadap efektifitas 0.055 satuan.

4. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F statistik dilakukan untuk melihat secara bersama-sama (simultan) apakah ada pengaruh signifikan variabel bebas (Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja) terhadap variabel terikat (Efektifitas

Program). Rumusan hipotesis yang digunakan dalam uji F statistik adalah sebagai berikut:

Rumusan hipotesis yang digunakan dalam uji F statistik adalah sebagai berikut. H_a : Anggaran Pendapatan dan Belanja berpengaruh simultan terhadap Efektifitas Program. Dari hasil olahan data menggunakan analisis regresi dalam SPSS, diperoleh output hasil Uji F pada tabel 4.7 sebagai berikut :

**Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik F**

ANOVA^b		
Model	F	Sig.
Regression	120.163	.000 ^a
Residual		
Total		

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah

Dari tabel 4.7 dapat dianalisis bahwa nilai F hitung sebesar 120.163 lebih besar dari F Tabel sebesar 3.15 dengan $n=60$ dan $k=2$, serta nilai signifikansi sebesar 0.00 atau lebih kecil dari 0.05 ($\alpha=5\%$) sehingga hipotesis altenatif satu (H_a) diterima dan menolak hipotesis nol (H_0) artinya bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja berpengaruh secara simultan terhadap Efektifitas Program.

b. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk setiap variabel bebas (Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja) apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Efektifitas Program)

secara parsial. Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik t dengan SPSS ver 19 pada tabel 4.8 maka diperoleh data, dan dapat disimpulkan:

**Tabel 4.8
Hasil Uji Statistik t**

Model	Coefficients ^a		
	Beta	T	Sig.
1 (Constant)		48.180	.000
X1	.858	10.998	.000
X2	.387	3.688	.001

Sumber: data diolah

- 1) Variabel Anggaran Pendapatan memiliki t hitung sebesar 10.998 lebih besar dari t tabel sebesar 1.671 dengan nilai signifikansi 0.000 atau lebih besar dari 0.05 (alpha $\alpha = 5\%$), sehingga hipotesis alternatif satu (H_a2) diterima dan menolak hipotesis nol (H_0) artinya bahwa : Anggaran Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Program. Hal ini menunjukan bahwa besaran Efektifitas Program dapat ditentukan berdasarkan pengaruh Anggaran Pendapatan. Besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan terhadap Efektifitas Program $(0.858)^2 \times 100\% = 0.736\%$
- 2) Variabel Realisasi Belanja memiliki t hitung sebesar 3.688 lebih besar dari t tabel sebesar 1.671 dengan nilai signifikansi 0.01 atau lebih besar dari 0.05 (alpha $\alpha = 5\%$), sehingga hipotesis alternatif tiga (H_a3) diterima dan menolak hipotesis nol (H_0) artinya bahwa : Realisasi Belanja berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Program. Hal ini menunjukan bahwa besaran Efektifitas Program

dapat ditentukan berdasarkan pengaruh Realisasi Belanja. Besarnya kontribusi Realisasi Belanja terhadap Efektifitas Program ($0.387^2 \times 100\% = 0.150\%$)

5. Hasil Uji Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa kemampuan variasi model untuk menerangkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika R^2 semakin besar (mendekati satu), seperti dijelaskan uji determinasi pada tabel 4.8 berikut :

**Tabel 4.8
Hasil Uji Determinasi**

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.821 ^a	.674	.669	4.19386

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah

Dari tabel 4.8. diatas dapat dikatakan bahwa pengaruh Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja adalah besar terhadap variabel terikat yaitu Efektifitas Program. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat.

Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang dilihat dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.669 hal ini berarti bahwa 66.9 % Y dapat dijelaskan oleh variasi kedua variabel independen yaitu X1 dan X2, sedangkan sisanya ($100\% - 66.9\% = 33.1\%$) dijelaskan oleh sebab lain diluar model atau variabel lain yang tidak diteliti.

6. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh Anggaran Pendapatan terhadap Efektifitas Program

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, menyatakan bahwa terdapat anggaran pendapatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektifitas program, hal ini telah sesuai dan konsisten dengan hipotesis alternatif yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah.

Sehingga dapat disimpulkan, semakin besar anggaran pendapatan maka diharapkan semakin besar pula realisasi belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah, diharapkan dalam pembiayaan terhadap suatu program dapat berhasil dengan efektif dalam satu periode tahun anggaran.

Hal ini konsisten sebagaimana hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Granita Quartiana (2003), yang membahas mengenai pengaruh anggaran terhadap efektifitas kinerja, mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap pencapaian kinerja pendidikan, walaupun hasil yang dicapai dari kinerja tersebut belumlah efisien dan efektif.

Anggaran memegang peranan dalam pencapaian tujuan organisasi, namun pada implementasinya, efektifitas tidak menyatakan seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai agar dapat terwujud tujuan dan sasaran dari organisasi tersebut, boleh jadi dan kemungkinan anggaran

dua kali lebih besar atau tiga kali lebih besar dari yang telah dianggarkan (Mardiasmo : 2002).

Oleh karenanya dapat disimpulkan, berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi sebesar 66.9% bahwa anggaran pendapatan bukan satu-satunya sebagai faktor penentu dalam keberhasilan tercapainya efektifitas program, terutama program pendidikan dasar sembilan tahun di Indonesia. Efektifitas program yang dinyatakan dalam angka partisipasi kasar, pada setiap provinsi yang ada di Indonesia maupun secara nasional belumlah menunjukkan hasil yang maksimal.

b. Pengaruh Realisasi Belanja terhadap Efektifitas Program

Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan, bahwa realisasi belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektifitas Program. Hal ini telah sesuai dengan hipotesis alternatif yang dikemukakan pada bab sebelumnya.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya Realisasi Belanja adalah semua pengeluaran bendahara umum/negara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi belanja yang dikeluarkan untuk pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan program, maka semakin baik dan semakin tinggi efektifitas yang dihasilkan program tersebut.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Novia Andriana (2011) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Realisasi

Tata Kelola Anggaran Pembangunan Pendidikan, dapat diketahui bahwa anggaran pendidikan yang dikelola seratus persen, dengan kata lain apa yang sudah dianggarkan konsisten dengan realisasi belanjanya, maka akan tercipta kinerja yang efektif seperti apa yang diharapkan. Alokasi anggaran yang relatif kecil akan mempengaruhi efektifitas kinerja program dalam bidang pendidikan.

Struktur dari realisasi belanja pendidikan dasar sembilan tahun terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial. Semakin tinggi dan konsisten pelaksanaan anggaran semakin tinggi pula efektifitas kinerja yang dihasilkan dari suatu program. Oleh karenanya dapat disimpulkan, berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi sebesar 66.9% bahwa realisasi belanja bukan satu-satunya sebagai faktor penentu dalam keberhasilan tercapainya efektifitas program, terutama program pendidikan dasar sembilan tahun di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan :

- a. Telah terbukti secara simultan bahwa anggaran pendapatan dan realisasi belanja, berimplikasi secara positif dan signifikan terhadap efektifitas program pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Dalam hal ini berarti semakin besar anggaran pendapatan yang ditetapkan, dan penyerapan yang dilakukan atas anggaran pendapatan tersebut dalam bentuk realisasi belanja yang terjadi, maka akan semakin berpengaruh terhadap tercapainya efektifitas program pendidikan dasar sembilan tahun. Dengan diperoleh hasil uji hipotesis secara simultan terhadap anggaran pendapatan dan realisasi belanja maka, didapat pengaruh yang positif dan signifikan, namun pada kenyataannya program wajib belajar sembilan tahun tersebut masih belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan hasil program yang dicapai tersebut, dicerminkan dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) yang belum mencapai hasil Tuntas Paripurna. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa pengaruh langsung dari anggaran pendapatan dan realisasi belanja yang dijelaskan oleh *Adjusted R Square* sebesar 0.669 atau 66.9 %. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa efektifitas program wajib belajar

sembilan tahun sebagian besar dapat dipengaruhi oleh variabel anggaran pendapatan dan belanja. Hasil yang dicapai pada uji koefisien determinasi tersebut, membuktikan bahwa penelitian ini telah sesuai dan sejalan dengan kajian empiris yang dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu dan teori yang dikemukakan pada kajian teori.

- b. Telah terbukti juga bahwa anggaran pendapatan berimplikasi secara positif dan signifikan terhadap efektifitas program wajib belajar sembilan tahun. Hal ini berarti semakin besar pendapatan yang direncanakan dan diperoleh pemerintah daerah dari sumber dana dekonsentrasi pemerintah pusat, maka berpengaruh positif terhadap efektifitas program wajib belajar sembilan tahun yang dicapai oleh pemerintah disetiap provinsi, hal ini didukung dengan hasil uji t untuk variabel Anggaran Pendapatan (X1). Dengan Anggaran pendapatan yang direncanakan pemerintah pusat dan didistribusikan kepada pemerintah daerah melalui dana dekonsentrasi untuk setiap provinsi, pada saat ini belum dapat menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun setelah sekian lama dicanangkan, khususnya pada periode penelitian ini yaitu 2006-2010. Oleh karenanya program wajib belajar sembilan tahun belum dapat dikatakan berhasil dan berjalan dengan efektif, karena kinerja yang dihasilkan dalam Angka Partisipasi Kasar masih belum mencapai Tuntas Paripurna.
- c. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa realisasi belanja (X2) yang keluarkan berimplikasi secara positif dan signifikan terhadap efektifitas program. Hal ini berarti bahwa semakin besar realisasi belanja yang dilakukan pemerintah, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap

efektifitas program pendidikan dasar sembilan tahun. Dengan realisasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing anggaran pemerintah daerah di Indonesia, melalui penyerapan anggaran yang maksimal pada setiap provinsi diharapkan mampu mencapai tujuan yaitu tuntasnya program wajib belajar sembilan tahun. Namun demikian didalam penelitian ini didapatkan fenomena, bahwa penyerapan terhadap anggaran melalui realisasi belanja tidak maksimal, dan sangat berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan oleh program wajib belajar sembilan tahun, pada indikator Angka Partisipasi Kasar selama periode tahun 2006-2010. Perencanaan pemerintah yang diimplementasikan melalui anggaran yang sudah direncanakan pemerintah tidak berjalan optimal, anggaran yang telah ditetapkan tidak terserap dengan baik dan makasimal sehingga tidak sesuai dengan perencanaan pemerintah, dan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai, Angka Partisipasi Kasar selama periode penelitian tahun 2006-2010, tidak maksimal sehingga program wajib belajar sembilan tahun belum berjalan efektif belum mencapai Tuntas Paripurna.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti telah secara optimal dilaksanakan dengan mengikuti prosedur penelitian, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak dapat dilakukan dengan sempurna yang diakibatkan keterbatasan peneliti, diantaranya:

- a. Masih minimnya penelitian yang membahas tentang variabel penelitian ini yaitu variabel anggaran secara metodologi kuantitatif.

- b. Peneliti hanya menggunakan dua variabel yaitu anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang ditetapkan, asumsinya masih banyak variabel lain yang tidak diteliti yang mempengaruhi efektifitas akan tetapi sulit untuk ditelusuri karena ketersediaan data yang dipublikasi dan laporan yang konsisten.
- c. Rentang waktu dalam penelitian ini hanya diambil selama rentang waktu lima tahun yaitu tahun anggaran 2006 sampai 2010 , tentunya jika dalam penelitian menggunakan data yang rentang waktunya lebih panjang akan memberikan validitas hasil yang lebih baik.
- d. Penelitian hanya dilakukan pada 12 provinsi di Indonesia yang memenuhi kriteria, hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk provinsi yang dijadikan sampel penelitian, sehingga belum dapat digeneralisir untuk seluruh provinsi di Indonesia.
- e. Penelitian ini tidak membahas kebijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan penyusunan anggaran bagi bidang pendidikan.

3. Saran

- a. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, untuk meningkatkan efektifitas program pendidikan wajib belajar sembilan tahun dengan predikat Tuntas Paripurna melalui indikator Angka Partisipasi Kasar, dan hendaknya pemerintah dapat terus mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya baik manusia maupun finansial. Untuk meningkatkan kinerja yang dihasilkan melalui indikator Angka Partisipasi Kasar, pemerintah seyogyanya:

1. Menambah kuantitas dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, khususnya program pendidikan dasar sembilan tahun.
2. Mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui realisasi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial secara maksimal, dan sesuai dengan perencanaan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan, serta pengelolaan keuangan negara yang transparansi dan akuntabel.
4. Peningkatan fasilitas sarana belajar mengajar yang mendukung peningkatan tercapainya tujuan pendidikan dasar sembilan tahun yaitu tuntas paripurna.
5. Dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat terhadap pemerintah dalam membantu terlaksananya wajib belajar sembilan tahun, agar berhasil dengan tercapainya tujuan tuntas paripurna.

b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sampel penelitian selain provinsi yang telah ditetapkan dan menggunakan jenis-jenis variabel, dalam penelitian yang akan datang lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis anggaran lain yang diperuntukan bagi pendidikan.

c. Bagi akademis

Bagi akademis, disarankan dapat memotivasi para peneliti untuk lebih mengembangkan penelitian dengan menggunakan berbagai variabel lain yang lebih bervariasi, khususnya bagi bidang akuntansi pemerintahan dan

pengawasan keuangan negara, agar dapat memberikan kontribusi bagi negara dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Penerbit. Rhineka Cipta. Bandung. 2004.
- Bahtiar Arief, Muchlis dan Iskandar. *Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Akademia. Jakarta 2009
- Bastian, Indra. *Manual Akuntansi PemerintahDaerah*. Cetakan Pertama. Pusat Pengembangan Akuntansi FE UGM. Yogyakarta. 2001
- BNSP, Badan Standar Nasional Pendidikan 2006
- Chandler Ralph C. and Plano Jack C., 1982, *The Public Administration Dictionary*, John Wiley & Sons, New York
- Brisbane, Toronto, Singapore
- C. Trihendradi, Analisis Statistik menggunakan SPSS 19 Deskriptif, Parametrik dan Non Parametrik, Penerbit Andi Yogyakarta, 2011
- Dajan, Anto. Pengantar *Metode Statistik*. Jilid I. LP3ES. Jakarta. 1991.
- Deddy ordiawan, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. *Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta. 2008.
- Ellwood. 1993 Didalam Mahsun, M. 2006. WWW.Google.co.id, 7 Agustus 2008.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2006.
- Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri. *Anggaran Perusahaan*. Edisi Ketiga. Penerbit BPFE. Yogyakarta. 1989.

- Gibson, L. James, John M. Ivancevich, Donely, James H. Jr., 1997, Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses (Penerjemah Djoerban Wahid), Erlangga, Jakarta
- _____, 1986 Organisasi dan Manajemen (penerjemah Djoerban Wahid), Erlangga, Jakarta
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Ketiga. Salemba Empat. Jakarta. 2008.
- Ibnu Sjamsi, 1988, Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara, BPFE, Yogyakarta
- Jones, Rowan & Peldenbury, Maurice 2000. *Publik Sector Accounting, 5th Editon* . Prentice Hall
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2000. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jakarta
- LKPP Republik Indonesia Periode 2006-2010
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta 2002
- _____. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI. Yogyakarta 2005.
- _____. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta 2009
- Martani Huseini, dan S.B. Lubis, 1987, Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro PAU-UI, Jakarta
- Mulyadi. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2001
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. 1999.
- Nugroho, Bhuono, Agung. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Edisi I. Penerbit. ANDI. Yogyakarta. 2005.
- Paslah, Asroni : Pencapaian Program Wajib Belajar 9 Tahun

- Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005. Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan
- Rosjidi. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah : Kerangka Standar dan Metode*. Aksara Satu. Surabaya. 2001
- Ridwan. Belajar Penelitian *Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*. Penerbit : CV. Alfabetha. Bandung. 2005
- Ridwan dan Huseini Usman. Statistik Untuk Pimpinan. Penerbit.
CV Alfabeta. Bandung. 1997.
- Steer, Reichard, 1985, Efektifitas Organisasi (penerjemah Magdalena Jamin), Erlangga, Jakarta
- Stoner, AF James, 1986, Manajemen, (Penerjemah Antarikso), Erlangga, Jakarta
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kesepuluh. CV Alfabeta. Bandung. 2007.
- The Liang Gie, 1986, Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara, Yogyakarta, BPFE
- Uma, Sekaran. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis (Research Methods for Business)*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta. 2006
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- Undang-undang No 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011/2012
- Widodo, Joko. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Penerbit Insan Cendikia. Surabaya 2001

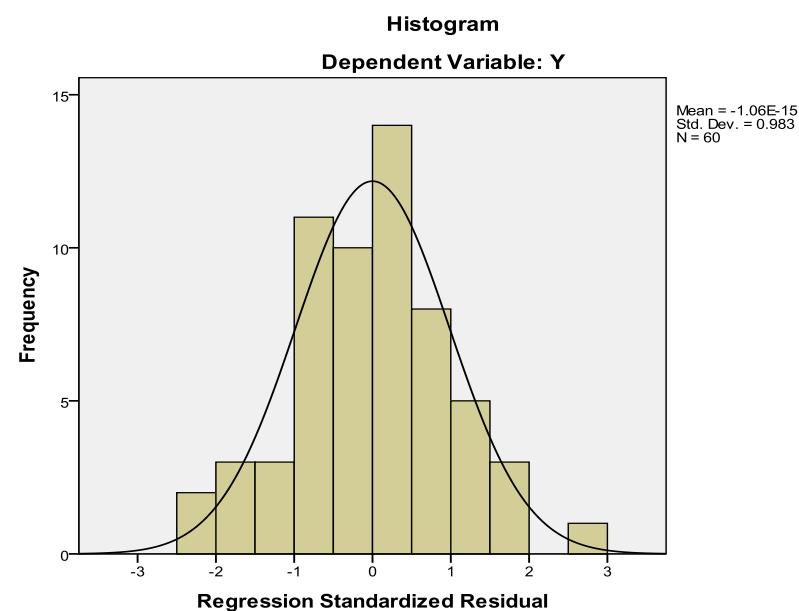
www.bps.go.id tentang data APK (Angka Partisipasi Kasar)
www.depdknas.go.id. tentang data pendidikan dasar
www.dirjen perbendaharaan.go.id tentang data keuangan
www.psp.kementerian diknas.go.id tentang data pendidikan dasar

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	60	65.00	97.00	80.2000	7.28779
X1	60	.51	2.58	1.4655	.68776
X2	60	116.00	858.00	379.7500	212.44737
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data diolah

Hasil pengujian normalitas



Sumber: data olahan

Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov

Uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

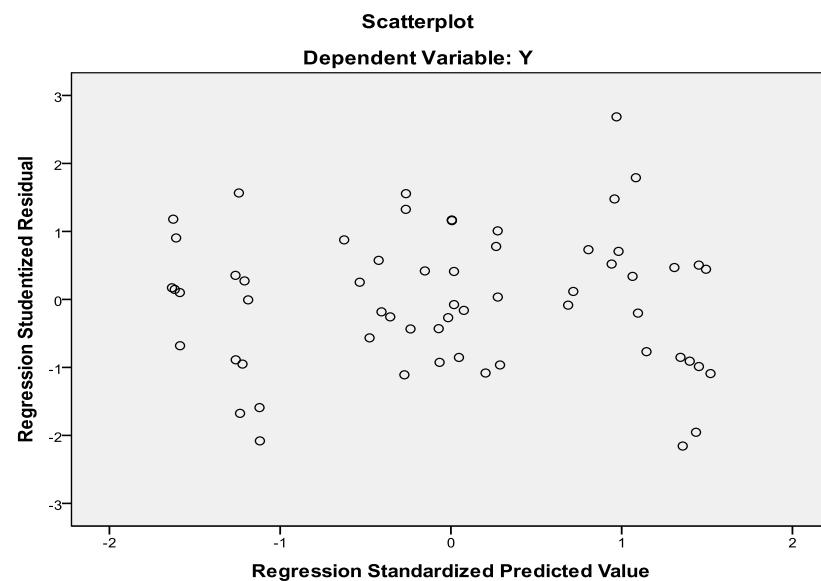
		Y	X1	X2
N		60	60	60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	80.2000	1.4655	379.7500
	Std. Deviation	7.28779	.68776	212.44737
Most Extreme	Absolute	.099	.132	.155
Differences	Positive	.055	.132	.155
	Negative	-.099	-.115	-.107
Kolmogorov-Smirnov Z		.767	1.024	1.203
Asymp. Sig. (2-tailed)		.599	.246	.111

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data diolah

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah

Hasil Pengujian Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	.902	1.109
X2	.902	1.109

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah

Hasil Pengujian Autokorelasi dan Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.829 ^a	.687	.676	4.14809	1.730

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah

Hasil Pengujian Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	68.409	1.420		48.180	.000
X1	9.095	.827	.858	10.998	.000
X2	.055	.015	.387	3.688	.001

Sumber : data diolah

Hasil Pengujian Statistik F

ANOVA^b					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2113.471	1	2113.471	120.163	.000 ^a
Residual	1020.129	58	17.588		
Total	3133.600	59			

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah

